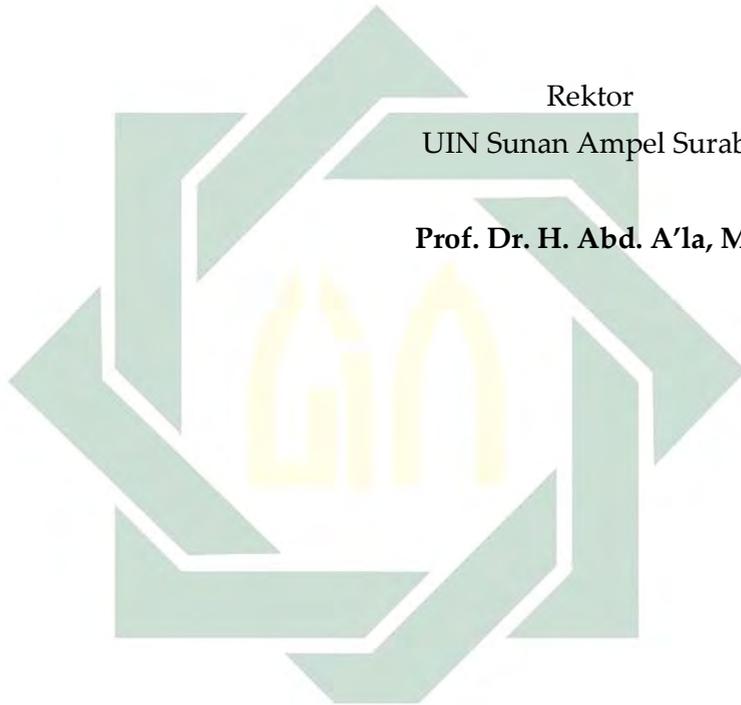


Kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.



Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya
Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

Uraian Materi

HAKEKAT MUTU DALAM PENDIDIKAN

Pengertian Mutu

Satu hal yang kita bisa memastikan bahwa mutu adalah apa yang membuat perbedaan antara hal-hal yang baik dan tidak baik. Mutu membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Organisasi-organisasi yang terbaik, apakah publik atau swasta, memahami mutu dan rahasianya. Mencari sumber kualitas adalah suatu pencarian yang penting. Pendidikan juga mengakui perlunya untuk mengejar itu, dan memberikan layanan mutu kepada siswa dan mahasiswa.

Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, terutama dalam bidang jasa yang dapat dipersepsi secara beragam. Kualitas dapat dipahami sebagai perbaikan terus-menerus. Kualitas dapat berarti keunggulan. Kualitas dapat berarti pemenuhan harapan pelanggan.¹ Hansen sebagaimana dikutip Naronha, menyayangkan bahwa sampai saat ini konsep kualitas diartikan terfragmentasi dan ambigu baik dalam literatur maupun dalam praktik. Setelah melakukan pencarian literatur Hansen telah mengidentifikasi lima definisi utama yaitu, kualitas sebagai produk, kualitas sebagai mana pandangan konsumen, kualitas sebagai pemenuhan harapan pelanggan, kualitas sebagai nilai, dan kualitas sebagai adaptasi terhadap teknis spesifikasi atau manufaktur.

Menurut Gravin dan Ross, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hadis dan Nurhayati, bahwa mutu dapat ditinjau dari lima perspektif, yaitu *transcendental approach*, *product based approach*, *user based approach*, *value based approach*, dan *manufacturing based approach*.² Musik, drama, seni tari, dan seni rupa berhubungan dengan *transcendental approach*. *Product based approach* menganggap bahwa mutu sebagai karakteristik atau attribute yang

¹ Carlos Naronha, *The Theory of Culture-specific Total Quality Management: Quality management in Chinese Regions*, (New York: Palgrave, 2002), hal. 13.

² Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89.

dapat dikuantifikasikan dan diukur. *User based approach* mendasarkan pemikiran bahwa mutu tergantung pada orang yang menggunakannya dan produk yang paling memuaskan preferensi orang. *Value based approach* memandang mutu dari segi nilai dan harga. Mutu dalam perspektif *value* adalah relative karena yang memiliki mutu paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Bisa jadi produk yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat dinilai.³

Manufacturing based approach mengutamakan pada perekayasaan dan mendefinisikan mutu pada persyaratannya. Pendekatan *manufacturing* beranggapan bahwa yang menentukan mutu adalah standar-standar yang ditentukan oleh perusahaan, bukan konsumen yang menentukannya, bukan konsumen yang menggunakannya.

Mutu sebagai produk, menurut Juran, adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kesesuaian penggunaan produk tersebut didasarkan atas lima cirri utama berikut, yaitu (1) teknologi yaitu kekuatan, (2) psikologis, cita rasa atau status, (3) waktu, yaitu kehandalan, (4) kontraktual, yaitu ada jaminan, dan (5) etika, yaitu sopan santun.⁴

Kecocokan penggunaan produk dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu apabila produknya memenuhi tuntutan pelanggan dan tidak memiliki kelemahan. Ciri-ciri produk yang memenuhi tuntutan pelanggan dan memuaskan pelanggan karena produk tersebut bermutu tinggi dan memiliki ciri khusus yang berbeda dari produk pesaing. Dengan mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar, omset penjualan, dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Mutu produk yang tinggi membuat perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan. Rendahnya tingkat kesalahan dapat mengurangi pemborosan baik waktu maupun biaya. Kesalahan yang rendah dapat mengurangi biaya garansi, ketidakpuasan pelanggan, dan pengujian. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan hasil, meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi serta memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa.

³ Ibid., hal. 89-90.

⁴ Ibid.

Mutu produk menurut Crosby adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Apabila produk sesuai dengan standar atau standar mutu yang telah ditentukan, produk tersebut dikatakan produk yang bermutu. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.⁵

Dalam pendidikan mutu produk secara sederhana dapat dilihat dari perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan dan ujian. Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, hasil pendidikan yang bermutu memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif. Artinya, disamping ditunjukkan oleh indikator seberapa banyak siswa yang berprestasi sebagai mana dilihat dalam perolehan nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh seberapa baik kepemilikan kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerja keras dan ulet, terampil, berbudi pekerti, beriman dan bertaqwa, bertanggung jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain sebagainya.

Hansen merumuskan definisi yang lebih jelas tentang mutu tetapi lebih penting lagi, konteks khusus seputar definisi harus dipahami dengan jelas. Bagi Naronha kualitas harus didekati dari perspektif manusia dan budaya, definisi kualitas tidak hanya diarahkan pada konteks sekitar organisasi, dan beberapa pengguna, tapi juga tujuan organisasi.

Naronha menyepakati pandangan transenden Garvin tentang konsep dasar dari kualitas. Dalam pandangan ini, kualitas didefinisikan sebagai 'keunggulan bawaan, baik yang dikenali dalam makna absolut dan universal, yaitu arti standar tanpa kompromi dan tinggi prestasi. Meskipun definisi tersebut jelas abstrak dan terlalu samar untuk tujuan praktis, pandangan transenden memenuhi prinsip utama di mana definisi pragmatis kualitas berdasarkan produk (misalnya meminimalkan produk variabilitas), manufaktur

⁵ Crosby, *Quality in Free*, (New York: McGraw Hill Book Inc., 1079), hal. 58

(misalnya rekayasa dan manufaktur praktek), pengguna (orientasi pelanggan misalnya), dan nilai (misalnya biaya dan harga) dapat dibuat lebih cocok dari pada yang spesifik yang untuk konteks tertentu. Dalam setiap organisasi, kualitas didasarkan pada pandangan transenden dan kualitas diciptakan oleh budaya kualitas karena budaya kualitas sebagai 'sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif untuk pembentukan dan terus-menerus peningkatan kualitas dan terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas'. Setiap proses kualitas tertentu, alat manajemen mutu, dan hasil kualitas atau hasil harus dipandang sebagai himpunan bagian dari prinsip yang luas. Pandangan transenden pada kualitas sebagai variabel budaya bertepatan dengan sifat manajemen. Memperlakukan kualitas sebagai variabel budaya memiliki keuntungan mengurangi ambiguitas dan inkonsistensi terkait dengan beberapa definisi dan dimensi kualitas.

Pandangan Naronha mirip dengan pandangan Garvin dan Davis, sebagai mana dikutip Haris, yang menyatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Mutu pendidikan menurut Naronha dan Garvin dapat digambar dengan refleksi empirik yang disampaikan Djaman Satori (2006) bahwa mutu pendidikan (MP) di sekolah merupakan fungsi dari mutu input peserta didik yang ditunjukkan oleh potensi siswa (PS), mutu pengalaman belajar yang ditunjukkan oleh kemampuan profesional guru (KP), mutu penggunaan fasilitas belajar (FB), dan budaya sekolah (SB) yang merupakan refleksi mutu kepemimpinan kepala sekolah. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$MP = f(PS.KP.FB.BS)$$

Potensi siswa (PS) adalah kepemilikan kemampuan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Dalam wacana psikologi pendidikan, kemampuan tersebut dikenal sebagai “natural or acquired talent” yang dibedakan menjadi kemampuan umum (General Aptitude) yang dinyatakan dalam ukuran IQ (Intelligent Quotient) dan kemampuan khusus yang biasa disebut bakat (social aptitude). Kemampuan umum yang dimiliki seorang anak biasa dipergunakan sebagai predictor untuk menjelaskan tingkat kemampuan menyelesaikan program belajar, sehingga

kemampuan ini sering disebut sebagai *scholastic aptitude* atau potensi akademik. Seorang siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi diduga memiliki kemampuan yang tinggi pula untuk menyelesaikan program-program belajar atau tugas-tugas belajar pada umumnya di sekolah, dan karenanya diperhitungkan akan memperoleh prestasi yang diharapkan. Sementara itu, kemampuan khusus atau bakat dijadikan *predictor* untuk berprestasi dengan baik dalam bidang karya seni, musik, akting dan sejenisnya. Atas dasar pemahaman ini, maka untuk memperoleh mutu pendidikan sekolah yang baik, para siswa yang dilayaninya harus memiliki potensi yang memadai untuk menyelesaikan program-program belajar yang dituntut oleh kurikulum sekolah.

Kemampuan profesional guru direfleksikan pada mutu pengalaman pembelajaran siswa yang berinteraksi dalam kondisi proses belajar mengajar. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh: (1) tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran dan penguasaan struktur konsep-konsep keilmuannya, (2) metode, pendekatan, gaya/seni dan prosedur mengajar, (3) pemanfaatan fasilitas belajar secara efektif dan efisien, (4) pemahaman guru terhadap karakteristik kelompok/perorangan siswa, (5) kemampuan guru menciptakan dialog kreatif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan (6) kepribadian guru. Atas dasar analisis tersebut, maka upaya guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah harus disertai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dan memperbaiki kualitas kepribadian gurunya. Pada tingkat sekolah, upaya tersebut ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan berikut, yaitu: (1) interaksi kolegialitas di antara guru-guru, (2) pemahaman proses-proses kognitif dalam penyelenggaraan pengajaran, (3) penguasaan struktur pengetahuan mata pelajaran, (4) pemilikan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai, keyakinan, dan standar, serta (5) keterampilan mengajar, dan (6) pengetahuan bagaimana siswa belajar.

Fasilitas belajar menyangkut ketersediaan hal-hal yang dapat memberikan kemudahan bagi perolehan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Fasilitas belajar yang sangat penting adalah laboratorium yang memenuhi syarat bengkel kerja, perpustakaan, komputer, dan kondisi fisik lainnya yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan belajar.

Budaya sekolah adalah seluruh pengalaman psikologis para siswa (sosial, emosional, dan intelektual) yang diserap oleh mereka selama berada

yang lebih sulit. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasanya menjadikan mutu sebagai jaminan, terutama ketika secara teratur ketika memberikan layanan mutu dalam pendidikan. Kita menyadari saat itu bahwa mutu yang kita janjikan itu kurang dan belum sesuai yang dijanjikan. Kita sering hanya mengenali pentingnya kualitas ketika kita mengalami rasa frustrasi dan ketika waktu telah berlalu.

Kualitas adalah ide yang telah menjadi perbincangan setiap orang. Di Inggris telah dikenal *the Citizen's Charter* (Piagam Warga), *the Business Excellence Model* (Model Usaha Unggul) dan *the Investor in People Standar*, sementara Amerika Serikat memiliki Malcolm Baldrige Award (Penghargaan Malcolm Baldrige) dan Jepang memiliki Penghargaan Deming. Yayasan di Eropa untuk Manajemen Mutu telah mengembangkan *Quality Award* (penghargaan Mutu), sementara di tingkat internasional ada Seri Standard ISO9000. Ini hanya beberapa dari penghargaan terhadap mutu yang berpengaruh dan standar yang telah diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas dan keunggulan dalam berbagai industri dan jasa. kesadaran baru tentang kualitas sekarang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan dituntut untuk mengembangkan pendekatan sendiri terhadap kualitas, dan harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas yang konsisten

Menurut Haris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen mutu berpengaruh terhadap terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian, dapat dipahami bahwa ada hubungan antara dimensi mutu dan kinerja organisasi. Suatu penelitian juga membuktikan bahwa praktik manajemen mutu memiliki pengaruh terhadap kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan.⁶

Oleh karena itu, pentingnya mutu dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu manajemen operasional dan pemasaran. Dalam perspektif manajemen operasional, mutu produk berfungsi dalam meningkatkan daya saing suatu produk yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bagi lembaga pendidikan, mutu lulusan menjadi suatu hal yang sangat penting karena memungkinkan pelanggan memperoleh kepuasan. Kepuasan pelanggan

⁶ Abdul Haris dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, hal. 87.

Western Electric, Deming pindah ke Departemen Pertanian Amerika Serikat, di mana dia dikenalkan dengan seorang yang mempengaruhi pemikirannya dan memperkenalkan pada Deming sejumlah ide yang krusial untuk perkembangan gerakan mutu. Walter Shewhart adalah ahli statistic yang bekerja di Laboratorium Bell di New York. Dia telah mengembangkan teknik-teknik untuk membawa proses perusahaan pada apa yang dikenal dengan *kendali statistic* atau *statistical control*. Teknik ini adalah serangkaian teknik untuk mengganti berbagai sumber daya dari proses industry, sehingga membuat mereka dapat mengontrol dan memprediksi proses industry. Tujuan Shewhart adalah menggunakan kontrol statistic untuk mengeliminasi pemborosan dan penundaan hasil produksi. Salah satu kontribusi Shewhart yang terakhir, yang juga dikembangkan oleh Deming, adalah siklus *plan, do, check, anct* (PDCA) yang memperkenalkan metode pertama untuk manajemen peningkatan mutu yang berkelanjutan. Deming memberikan kontribusi dengan melanjutkan metode Shewhart. Metode statistic Deming dan Shewhart adalah metode yang sekarang dikenal dengan Kendali Proses Statistik atau *Statistical Process Control* (SPC). Metode ini dipadukan dengan ide gerakan *human relation* bersama dengan Mayo dan kolega-koleganya dan SPC adalah teori yang dikembangkan sebagai *Total Quality Management* (TQM).

Gerakan mutu mengalami sukses yang pertama kali setelah Perang Dunia II tetapi tidak di Amerika meskipun Amerika adalah pelopor berbagai teknik peningkatan mutu. Berbeda dengan di Jepang di mana gerakan mutu telah menyebar luas. Deming pertama kali mengunjungi Jepang pada akhir 1940-an untuk bekerja pada sensus paska perang. Terkesan dengan cara kerja Deming, ikatan insinyur dan ilmuwan Jepang mengundang Deming kembali ke Jepang pada 1950 untuk mengajarkan pada pengusaha-pengusaha terdepan di Jepang bagaimana menerapkan *Statistical Process Control*. Masyarakat Jepang telah berkonsentrasi memperbaiki perusahaan yang terkoyak karena perang. Bom yang dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya telah mengkoyak dan menghancurkan industry Jepang dan meninggalkan kesan Jepang sebagai perusahaan yang miskin mutu dan tertinggal dengan produksi perusahaan negara-negara lainnya. Jepang ingin belajar teknik-teknik industry baru

terutama tentang kendali mutu dari Negara industrialis lainnya. Di depan audiennya, Deming memberikan jawaban sederhana untuk menjawab persoalan yang dihadapi perusahaan Jepang. Dia menyarankan mereka tidak memulai dengan kendali mutu, tetapi memulai dengan menemukan apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Dia menyarankan mereka mendesain baik metode produksi dan produk industri dengan standar tinggi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Deming yakin bahwa pendekatan ini akan menjadikan perusahaan Jepang maju dan menjadi yang terdepan dalam waktu lima tahun.

Jepang telah menerapkan ide-ide Deming, Joseph Juran, dan ahli mutu Amerika lainnya. gerakan mutu bermula dari manufaktur dan diikuti oleh industri layanan jasa, dan berikutnya perbankan dan jasa keuangan. Jepang mengembangkan ide Juran kepada apa yang disebut Kendali Mutu Terpadu atau *Total Quality Control* (TQC) dan menggunakannya menguasai dan menciptakan dunia pasar di bidang otomobil dan elektronik pada 1970-an dan 1980-an. Penguasaan pangsa pasar ini berdampak pada perhatian pada mutu. Penulis terkenal tentang mutu, adalah Kauro Ishikawa, yang menjelaskan pendekatan TQC sebagai “Revolusi Pemikiran bidang manajemen.

Di Amerika, pemikiran Deming dan Juran diabaikan selama bertahun-tahun. Pada 1950-an dan 1960-an perusahaan Amerika dapat menjual apa saja yang mereka produksi pada bidang makanan. Penekanan perusahaan Amerika dan Barat adalah tentang memaksimalkan output dan keuntungan. Bagi pasar pembeli makanan, mutu bukan prioritas utama. Baru pada akhir tahun 1970-an ketika beberapa perusahaan kehilangan baik peluang pasar maupun serapan pasar di Jepang sehingga sejumlah mayoritas perusahaan Amerika mulai memperhatikan mutu secara serius. Mereka mulai mempertanyakan mengapa pelanggan lebih memilih produk-produk Jepang. Di Amerika, sering dikatakan bahwa Dokumen NBC pada 1980 menyatakan, “Jika Jepang bisa Kenapa kita tidak”. Jepang pada saat itu telah mendominasi program-program yang lebih tinggi sebagai keberhasilan ide Edward Deming terhadap kesuksesan ekonomi Jepang. Sejak saat itu, ide-ide Juran dan Deming bersamaan dengan ahli lainnya, seperti Philip B. Crosby dan Armand V. Feigenbaum telah menangkap imajinasi perusahaan tidak hanya di Amerika tetapi juga di Eropa Barat

meskipun kenyataannya hanya beberapa kecil perusahaan yang menerapkan TQM secara serius. Oleh karena itu, mutu telah dijadikan agenda utama meskipun membutuhkan waktu lama.

Perkembangan ini merupakan era berkembangnya jaminan mutu dengan menekankan pada biaya mutu, pengendalian mutu terpadu, *reliability engineering*, dan *zero defect*. Pengendalian mutu harus dimulai dari perancangan produk dan berakhir jika produk telah sampai ke tangan pelanggan yang puas. Menurut Feigenbaum, salah satu pemikir *Total Quality Control*, kegiatan mutu apat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengendalian rancangan baru, bahan baku, dan produk.¹

Pencarian jawaban untuk kompetisi Jepang telah disorot dalam salah satu buku manajemen yang paling berpengaruh tahun 1980-an. Peters dan Waterman menulis *In Search of Excellence* telah diterbitkan pada tahun 1982. Di dalamnya mereka menganalisa fitur penting dari perusahaan unggul, berdasarkan pada praktik terbaik yang kemudian berkembang di Amerika Serikat. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keunggulan adalah perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pelanggan yang paling kompetitif dan profit. Keunggulan yang ditunjukkan, sederhana namun penting, yaitu hubungan dekat dengan pelanggan dan obsesi dengan kualitas. Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat baik memiliki struktur yang sederhana dan tidak birokratis yang didasarkan pada tim yang aktif dan antusias yang dipimpin oleh manajer visioner yang memiliki gaya manajemen. Fitur-fitur ini dapat ditunjukkan oleh organisasi apapun asal negaranya dan budayanya, tetapi mereka adalah perusahaan-perusahaan Jepang yang memiliki antusias pada budaya TQC. Pesan dari Peters dan Waterman adalah bahwa manajer harus meletakkan selain pandangan jangka pendek dan mengambil pandangan jangka panjang. Untuk tetap menjadi yang terdepan, organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan. Secara umum diakui bahwa Jepang sebagai tempat kekuatan

¹ Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 93.

alih-alih meningkatkan kinerja, penilaian sering memiliki efek sebaliknya, dengan staf yang berkonsentrasi pada apa yang penting untuk mendapatkan peringkat kinerja baik daripada mengembangkan kebanggaan dalam pekerjaan mereka. Dia percaya bahwa penilaian kinerja memiliki efek menempatkan staf dalam persaingan dengan satu sama lain bukan menyatukan mereka menjadi tim yang kuat.

2. Joseph M. Juran

Lahir pada tahun 1904, Dr Joseph Juran, bersama dengan Deming, adalah seorang veteran pelopor utama lainnya revolusi mutu. Seperti Deming, ia sampai saat ini lebih dihormati di Jepang dari pada di Amerika Serikat asalnya. Pada tahun 1981 Kaisar Jepang memberikan kepadanya **Ketentuan Harta Suci** Kedua yang bergengsi, urutan tertinggi diberikan kepada non-Jepang. Juran adalah penulis dan editor sejumlah buku, termasuk buku pedoman tentang Kendali Mutu yang ditulis Juran, *Perencanaan Kualitas Juran tentang Kepemimpinan untuk Mutu*. Pada edisi pertama *Quality Control Handbook*, yang diterbitkan pada 1950-an, ia menggunakan kata yang sekarang terkenal, yaitu kata 'ada emas di tambang! ". Dia mungkin paling terkenal karena menggunakan frasa "kebugaran untuk digunakan atau tujuan." Pentingnya ide ini adalah bahwa produk atau jasa dapat memenuhi spesifikasi, namun belum tentu cocok untuk tujuannya. Spesifikasi mungkin rusak atau mungkin tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Spesifikasi mungkin menuntut kondisi yang berkualitas, seperti sebagian kasus tetapi tidak itu cukup.

Juran adalah guru manajemen pertama yang berhubungan dengan issue manajemen mutu yang lebih luas. Dia yakin, seperti halnya Deming, bahwa semua problem mutu berkaitan dengan keputusan manajemen. Dia percaya bahwa kualitas yang rendah disebabkan manajemen yang buruk. Dengan menggunakan prinsip Pareto, Juran percaya bahwa 80 persen problem kualitas organisasi adalah akibat dari kendali manajemen. Sistem yang benar sering kali bermakna mutu yang tepat. Delapan puluh persen problem mutu terletak pada manajemen karena manajemen 80 persen mengendalikan organisasi.

peningkatan Crosby adalah salah satu yang paling praktis dan tersedia panduan rinci. Tidak seperti Deming lebih filosofis Pendekatan, model Crosby dapat diikuti sebagai suatu rencana tindakan. Crosby adalah seorang penulis populer dan pendekatan pada dasarnya praktis. Dalam karyanya Crosby menguraikan pandangannya bahwa dorongan sistematis untuk kualitas akan membayar sendiri. Dia mengatakan bahwa itu adalah ketidaksesuaian masalah yang mengarah untuk memo, pengerjaan ulang, refits, tes dan inspeksi. Ini adalah biaya kualitas. Tabungan datang dari melakukan hal-hal yang benar. Di bidang pendidikan, paralel dapat dilihat dengan biaya dan upaya merebut kembali ujian dan tingkat keberhasilan terkait dengan mereka.

zero cacat atau *zero defect* merupakan kontribusi utama Crosby, tetapi kontroversial, untuk berpikir pada kualitas. Ini adalah ide yang kuat. Ini adalah komitmen untuk keberhasilan dan penghapusan kegagalan. Ini melibatkan sistem di tempat yang memastikan bahwa hal-hal yang selalu dilakukan dalam cara yang benar di waktu pertama dan setiap setiap. Crosby berpendapat bahwa tujuan untuk *zero cacat*, dalam konteks bisnis, akan meningkatkan keuntungan dengan menghemat biaya. Dampak kualitas pada intinya adalah apa yang membuat model Crosby begitu menarik. Crosby tidak percaya pada tingkat statistik dapat mempengaruhi kualitas. Untuk Crosby hanya ada satu standar, dan itu adalah kesempurnaan. Model pencegahannya adalah murni, dan ia percaya bahwa adalah mungkin untuk menghindari kesalahan semakin dekat yang satu sampai ke nol cacat atau kesalahan. Namun, tidak semua komentator setuju dengan tesis ini. Misalnya, Joseph Juran, seorang kritikus dari Crosby, berpendapat bahwa, setelah suatu titik tertentu, sesuai dengan persyaratan sebenarnya bisa memaksakan biaya tambahan dan sebagai hasilnya dia tidak percaya bahwa nol cacat merupakan tujuan yang dapat dicapai.

Zero defect adalah sebuah konsep yang lebih sulit untuk diterapkan pada layanan daripada manufaktur. Dalam layanan nol cacat atau *zero defect* sesuatu yang diinginkan, tetapi sulit untuk menjamin bebas dari kesalahan-

tidak hanya berdasar pada kegiatan KBM sekolah, karena kompetensi juga memiliki komponen bawaan (karakter/sifat/sikap) dari siswa ditambah metode dan sarana KBM yang memadai. Maka, produk adalah hasil dari proses yang dilaksanakan oleh sekolah yang meliputi guru dan organisasi sekolah. Produk sekolah dalam bentuk Kegiatan Belajar Mengajar, dimana KBM tersebut dapat sepenuhnya dikendalikan terkait kualitas delivery/proses realisasinya oleh sekolah. Sedangkan siswa sebagai pelanggan, dimana karakternya tidak bisa sepenuhnya dijamin oleh sekolah.

Layanan Mutu dalam Pendidikan

Selain produk pendidikan, layanan pendidikan juga aspek penting untuk melihat mutu pendidikan karena pendidikan sangat erat berhubungan dengan layanan. Maka dari itu, untuk memahami penjelas mutu dalam pendidikan harus memahami makna pelayanan dalam pendidikan berikut ini akan dibahas apa itu layanan dalam pendidikan.

Membedakan antara produk dan layanan itu sangat penting karena keduanya berbeda dalam memahami mutu yang dapat dijadikan sebagai penjaminan mutu. Pertama, Layanan diberikan secara langsung oleh *people to people*. Antara pemberi layanan dan pelanggan atau pengguna layanan biasanya terikat oleh relasi yang dekat. Pelayanan tidak bisa dipisahkan dari person yang memberikan layanan dan orang yang mendapatkan layanan. Setiap interaksi antara keduanya berbeda-beda, dan pelanggan dalam hal-hal tertentu menentukan kualitas layanan. Kualitas layanan ditentukan oleh kedua orang yang memberikan dan menerima layanan.

Berbeda dengan produk, tidak ada pemberian layanan yang konsisten dan homogen dalam memberikan layanan. Konsistensi hanya ada pada relasi dan ikatan. Waktu adalah elemen penting dalam menentukan kualitas layanan. Layanan harus diberikan dengan tepat waktu. Selanjutnya, karena layanan harus dirasakan dan didapatkan pada saat layanan diberikan, pengendalian mutu layanan dengan inspeksi selalu terlambat. Interaksi antar individu ditemukan dalam pelayanan akan menghasilkan peluang-peluang untuk pemberian umpan balik

layanan yang buruk karena kadang-kadang tidak mungkin untuk meyakinkan pelanggan yang tidak puas.

Peranan Pelanggan terhadap Mutu

Mutu suatu produk tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan suatu produk. Dalam dunia pendidikan mutu pendidikan tergantung pada kepuasan pelangga. Oleh karena itu, membahas hakekat mutu menuntut pemusatan perhatian pada peranan pelanggan pendidikan. Pertanyaannya, siapakah pelanggan pendidikan? Pelanggan dalam dunia pendidikan adalah orang yang menggunakan jasa pendidikan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mereka dan dunia pendidikan juga membutuhkan mereka untuk mengelola lembaga pendidikan.

Menurut Salis pelanggan pendidikan biasa dikenal dengan istilah stakeholder pendidikan. Pelanggan pendidikan merupakan kelompok person yang beragam. Pelanggan pendidikan dikelompokkan pada pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Pelanggan eksternal adalah peserta didik, orang tua, masyarakat, termasuk juga pemerintah. Pemerintah dan masyarakat disebut juga dengan pelanggan eksternal tersier. Sedangkan pelanggan internal adalah pengelola pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan.¹

Peranan pelanggan terhadap mutu pendidikan sangat penting untuk menentukan mutu dalam pendidikan. Jika mutu pendidikan adalah kesesuaian antara keinginan dan yang diterima pelanggan, maka penting sekali mengidentifikasi apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang sudah mereka dapatkan dari layanan pendidikan. Berbagai organisasi yang mengikuti TQM mendefinisikan mutu sesuai dengan pandangan pelanggan mereka. Pelangganlah yang membantu menentukan mutu dan tanpa dukungan pelanggan lembaga tidak akan eksis. Berbagai lembaga yang telah memenangkan penghargaan dari TQM telah menggali kebutuhan pelanggan mereka. Sebagaimana Edwin L. Asrzt, pimpinan eksekutif Perusahaan Procter dan Gamble, menjelaskan: "Pelanggan kami adalah mereka baik yang menjual dan

¹ Edward Salis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogn Page, 2002), hal. 19.

Uraian Materi

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

Para pakar berbeda pandangan mengenai konsepsi mutu. Namun, pada dekade ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yaitu, W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran. W. Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah semua kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen–tidak terkecuali manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi.

Manajemen mutu adalah suatu upaya manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continous improvement*). Tujuan manajemen mutu adalah menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang akan memberikan kepuasan stakeholders dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan secara terus-menerus. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.

Masalah mutu menjadi konsep sentral di dalam organisasi. Mutu produk menjadi hal yang utama. Semua kegiatan organisasi terarah pada pencapaian produk yang bermutu. Mutu harus direncanakan dan dipersiapkan dari awal, dan terus diperhatikan sepanjang pelaksanaan, bukan lagi dalam pendekatan lama. Mutu diinspeksi pada saat-saat tertentu atau pada akhir kegiatan. Pada akhirnya, pemusatan mutu akan menumbuhkan dan meningkatkan produktifitas dan keuangan.

Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*), Pengendalian Mutu (*Quality Control*), dan Peningkatan Mutu (*Quality Improvement*)

Dalam manajemen mutu pendidikan ada tiga istilah penting yang harus dipahami, yaitu Penjaminan mutu pendidikan, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan arti meskipun ketiganya memiliki keterkaitan dalam manajemen mutu pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu perbedaan dari ketiga istilah tersebut:

Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*)

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diimplementasikan di dalam sistem mutu. Penjaminan mutu sebagai bagian sistem mutu adalah peningkatan mutu dengan berbasis pencegahan dan pemecahan masalah. Penjaminan mutu didesain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang bebas dari kesalahan.¹

Sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan sesungguhnya tidaklah sama (atau sesuatu yang berbeda) dengan mutu pendidikan (*quality of education*) itu sendiri. Mutu pendidikan lebih sebagai wujud terbaik yang dihasilkan oleh proses pembelajaran optimal di satuan pendidikan. Mutu pendidikan berfokus pada kualitas sosok yang tercipta sesuai yang diharapkan. Sementara sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan siklus manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kegiatan mengukur, mengevaluasi, dan mengawal mutu menyangkut praktik dan tradisi akademik dan non akademik pada satuan pendidikan.

Dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Quality Assurance bertujuan meningkatkan mutu karena penjaminan mutu adalah suatu proses pengukuran derajat kesempurnaan pelayanan dibandingkan

¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* () hal.

dengan standard dan tindakan perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan, untuk mencapai mutu pelayanan yang optimal sesuai dengan standard dan sumber daya yang ada.

Pengendalian Mutu (*Quality Control*)

Banyak rumusan tentang pengendalian (*controlling*) dikemukakan oleh para ahli manajemen. Schermerhon (1996:115) merumuskan pengendalian atau *controlling* “*as a process of monitoring performance and taking action to ensure desired result*”. Menurut Schermerhon, sasaran dari pengendalian adalah agar tercapai hasil yang diharapkan dan pencapaian hasil ini dilakukan melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan.

Hal yang sama dikemukakan oleh McLaughlin(1995:34). Menurut McLaughlin “*control means all necessary activities for achieving objectives in the long-term, efficiently and economically. Control, therefore is doing whatever is needed to accomplish what we want to do as an organization*”. Pada prinsipnya, rumusan McLaughlin tidak jauh berbeda dengan Schermerhon. Sasarannya agar tujuan dari organisasi, tetapi McLaughlin lebih merinci bukan hanya tujuan jangka pendek, melainkan juga tujuan jangka panjang, dan pencapaiannya harus efisien.

Rumusan yang lebih spesifik dikemukakan oleh Koontz, Donnell, dan Weinrich(1984:549). Menurut mereka, pengendalian(*controlling*) merupakan “*the measurement and correction of the performance of activities of subordinates in order to make sure that all levels of objectives and the plans devised to attain them are being accomplished*”. Walaupun maksudnya sama, tetapi dalam rumusan Koontz dan kawan-kawan, ada beberapa penegasan, bahwa kegiatan pengendalian itu ada dua macam, yaitu penilaian atau pengukuran dan perbaikan. Hal lainnya yang dinilai dan diperbaiki bukan hanya sasarannya, melainkan juga rencana pelaksanaan dari kegiatan.

Pengendalian merupakan konsep yang luas, berlaku untuk manusia, situasi, benda, dan organisasi. Dalam organisasi, pengendalian meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang terpenting dari proses ini adalah pengendalian manajemen yang merupakan tindakan-tindakan

yang proaktif. Dengan demikian, mutu yang rendah dapat ditingkatkan dengan melakukan peningkatan secara proaktif dan terus menerus. Menurut Husaini Usman, peningkatan mutu merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu agar sesuai dengan standar dengan membuat input, proses, dan outcome lebih baik lagi.²

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance System) atau SPM adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga organisasi memenuhi idealismenya dan stakeholders memperoleh kepuasan. SPM merupakan tata kelola yang baik, akuntabel dan peningkatan mutu yang terdiri dari serangkaian langkah yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memenuhi harapan pelanggan akan layanan dan produk/jasa yang disediakan. Dengan Sistem Penjaminan Mutu, akan tumbuh budaya mutu; menetapkan dan memiliki standar; melaksanakan standar; mengevaluasi pelaksanaan standar; dan meningkatkan standar secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Penerapan sistem penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan diharapkan dapat memperkecil jurang kesenjangan mutu antar berbagai daerah. Lembaga pendidikan sebagai lembaga pelayanan atau jasa, dituntut untuk memberikan jaminan mutu kepada pelanggan eksternalnya yaitu masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Secara historis, sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sekolah diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat menaruh harapan kepada sekolah agar

² Husaini Usman, *Manajemen: teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 524.

Paket 7

PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pendahuluan

Pelaksanaan penjaminan mutu adalah perwujudan dari akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap hak-hak masyarakat, terutama stakeholdernya sendiri, seperti guru atau pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Penjaminan mutu bertujuan menjamin hak-hak masyarakat karena masyarakatlah yang memberikan kontribusi dan masukan sumber daya kepada lembaga pendidikan.

Untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan hak-hak mereka atas kinerja lembaga pendidikan dalam memenuhi baku mutu pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan penjaminan mutu pendidikan internal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 menetapkan, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan kita mengenal dua jenis penjaminan mutu yakni: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu kepada inspeksi eksternal menuju paradigma yang bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP (PP No.19 Tahun 2005 Pasal 91).

Dalam paket ini akan dibahas penjaminan mutu internal mulai dari pengertian, langkah-langkah dan bentuk penjaminan mutu internal, yaitu evaluasi diri. Dalam hal ini, akan dijelaskan evaluasi diri di sekolah dan perguruan tinggi. Pada paket berikutnya, mahasiswa akan diajak praktik menyusun evaluasi diri untuk sekolah.

Uraian Materi

PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dasar dan Paradigma Penjaminan Mutu Internal Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu adalah perwujudan dari akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap hak-hak masyarakat, terutama stakeholdernya sendiri, seperti guru atau pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Penjaminan mutu bertujuan menjamin hak-hak masyarakat karena masyarakatlah yang memberikan kontribusi dan masukan sumber daya kepada lembaga pendidikan. Masukan sumber daya karena adanya janji-janji lembaga pendidikan sehingga masyarakat mau memasukkan anak mereka untuk belajar di lembaga pendidikan tersebut. Maka dari itu, masyarakat berhak menagih janji-janji dan tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan atas kinerjanya dan dalam memenuhi baku mutu pendidikan.

Untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan hak-hak mereka atas kinerja lembaga pendidikan dalam memenuhi baku mutu pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan penjaminan mutu pendidikan internal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 menetapkan, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan kita mengenal dua jenis penjaminan mutu yakni: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu kepada inspeksi eksternal menuju paradigma yang bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP (PP No.19 Tahun 2005 Pasal 91). Penjaminan mutu internal oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No. 19 Tahun 2005 pasal 49). Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi dan evaluasi kinerja masing-masing (PP No. 19 Tahun 2005 pasal 65).

Dengan demikian, penjaminan mutu internal pendidikan di lembaga pendidikan (sekolah dan PT) bentuknya berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan member penjaminan mutu internal, khususnya kepa stakeholder lembaga pendidikan, seperti guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, pimpinan, dan karyawan.

Sebelum diberlakukan evaluasi diri, bentuk akuntabilitas public dan pengendalian mutu adalah sistem pelaporan kepada atasan. Sampai sekarang sistem pelaporan masih berlaku dalam manajemen organisasi modern. Secara rutin unit terkecil sampai administrasi pusat diwajibkan membuat laporan pada unit yang lebih tinggi. Namun, sering laporan ini hanya sekedar membuat laporan dan tidak ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik.¹

Selain pelaporan ada juga sistem evaluasi. Menurut Hanief, penjaminan mutu internal, bahkan juga eksternal akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu apabila disatupadukan dengan sistem perbaikan mutu dan menjadi satu daur ulang atau siklus. Sistem perbaikan mutu yang berbentuk siklus perbaikan mutu berkelanjutan dapat dijadikan sebagai perencanaan mutu stratejik yang dilibatkan sejak awal dalam membuat perencanaan dan merumuskan kebijakan mutu pendidikan.²

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dalam satu daur perbaikan mutu berkelanjutan dapat dilakukan melalui empat tahap kegiatan, yaitu, (1) memperbaiki perencanaan mutu, (2) mempertegas komitmen kebijakan mutu yang implementatif, (3) melakukan pengorganisasian mutu dengan tata kelola yang baik, dan (4) melakukan evaluasi dan pemantauan. Empat kegiatan ini dibutuhkan untuk perbaikan mutu dan sebagai jaminan kepada masyarakat, khususnya stakeholder

¹ Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakani*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 102.

² Ibid., hal. 90.

Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Tahapan-tahapan proses SPMP ini merupakan suatu siklus yang saling terkait dan berlangsung secara sustainable (berkelanjutan). Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai stakeholders sekolah sesuai dengan amanat MBS (PP No. 19 Tahun 2005).

Sekolah perlu membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah. Dalam melaksanakan SPMP, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai pembina sekolah juga harus dilibatkan dalam TPS, sebagai wakil dari pemerintah.

SPMP tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa partisipasi dan pemberdayaan berbagai stakeholders sekolah, termasuk wakil pemerintah. Melalui SPMP, sekolah dapat melaksanakan program manajemen yang berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya masih belum dilakukan oleh banyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Data yang valid, secara empirik dan akurat, akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai rencana peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. Dengan demikian, 5 (lima) rangkaian tahapan SPMP yang berbasis data ini akan menjadi bagian vital dan utama dalam proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Implementasi tahapan-tahapan SPMP ini kemudian diharapkan menjadi budaya peningkatan mutu di sekolah/madrasah. Dari berbagai data valid yang dapat dikumpulkan sekolah (data dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, profil sekolah, dan lain-lain), Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan salah satu instrumen implementasi SPMP yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akseleratif dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan

(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2. Pendidikan).

Instrumen utama dalam pelaksanaan SPMPI adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS akan ditindaklanjuti dengan program Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Dengan demikian, SPMP, yang diimplementasikan dalam kegiatan EDS, akan menjadi komponen utama dalam lingkup implementasi MBS sebagai upaya pembudayaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang berkelanjutan.

Pengertian Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Sistem evaluasi yang pertama dikenal dalam dunia pendidikan adalah sistem pelaporan yang ditujukan pada atasan. Sampai saat ini sistem pelaporan masih terus dijalankan dalam manajemen organisasi modern. Secara rutin unit terkecil sampai administrasi pusat secara berjenjang harus membuat laporan. Sering kali laporan ini hanya menjadi laporan belaka tanpa disertai tindak lanjut tentang apa yang harus dilakukan dan diperbaiki.

Selain sistem pelaporan ada juga sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang pertama dikenal dalam dunia pendidikan adalah sistem evaluasi hasil belajar siswa. Setelah itu dikenal sistem evaluasi terhadap kinerja guru, dan selanjutnya dikenal sistem evaluasi administrasi dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.³

Evaluasi diri adalah bagian dari sistem evaluasi mutu internal. Sistem evaluasi diri bukan sebagaimana evaluasi biasa yang banyak dikenal dan dilakukan berbagai organisasi selama ini. Evaluasi diri membutuhkan umpan balik dari hasil evaluasi dan tindak lanjut tentang apa yang perlu dilakukan.

Di tingkat sekolah juga dikenal Evaluasi Diri (EDS), yaitu suatu proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk

³ Ibid., hal. 102-104.

mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan. Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan U U No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru). Alinea keenam Penjelasan Umum UU Sisdiknas : Strategi pembaharuan sistem pendidikan, antara lain pelaksanaan pengawasan sistem pendidikan nasional.

Pasal 8 UU Sisdiknas: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan , dan evaluasi program pendidikan Pasal 66 Bab XIX UU Sisdiknas: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing . (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan kuntabilitas public

Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya . Pengelolaan secara mandiri pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). perguruan tinggi, sebagai sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).

Hanief Saha Ghafur telah melakukan penelusuran sistem penjaminan mutu dan pembentukan badan internal pada tujuh PT-BHMN. Di antara tujuh PT tersebut terdapat keragaman pelaksanaan sistem penjaminan mutu. ITB telah mengembangkan sistem secara khusus dan mendirikan organisasi khusus secara berjenjang. Demikian pula dengan Universitas Indonesia yang mendiirikan lembaga penjaminan mutu internal pada tahun 2000 berbentuk Badan Audit Akademik (BAA). Badan ini didirikan tanpa perencanaan organisasi dan program yang matang, dan semuanya dilakukan sambil berjalan. BAA kemudian berganti nama menjadi Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA), yang mulai aktif bekerja dengan tujuh anggota sejak 1 Juni 2002 dan secara bertahap mengembangkan organisasi secara berjenjang, yaitu (1) Badan Penjaminan Mutu Akedemik (BPMA) yang ada di Pusat Administrasi Rektor UI, (2) Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) yang ada di setiap fakultas dan Program Pascasarjana, (3) Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) ada

di setiap departemen dan program studi. Namun, Sistem Penjaminan Mutu ini banyak menuai kritik dan saran dari para ahli dan kalangan internal UI. Kata “akademik” misalnya, membuat penjaminan mutu hanya pada aspek akademik semata. Sedangkan aspek non akademiknya seolah berada di luar kerja BPMA. Kritik berikutnya ditujukan pada stuktur penjaminan berjenjang. Kritik pada struktur dianggap kurang tepat karena tiap-tiap jenjang dianggap sebagai penjaminan mutu yang terpisah satu dengan lainnya. Padahal jenjang penjaminan mutu harus dikoordinasikan oleh penjaminan mutu universitas, sedangkan struktur di bawah menjadi Unit Pelaksana Penjaminan Mutu (UPPM) dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM).⁴

Di ITB dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang berstatus sebagai organisasi mandiri yang berada pada organisasi sayap kiri-kanan dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dua organisasi sayap kiri-kanan ini kedudukannya sama dengan wakil Rektor Senior. Di ITB SPM adalah organisasi pusat yang memiliki susunan berjenjang dan dilengkapi dengan Komisi Mutu. Komisi Mutu dipimpin ketua dan sekretaris dan dibantu anggota perwakilan dari beberapa fakultas dan program studi. Sementara itu, penjaminan mutu di setiap fakultas dan program studi disebut dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Selain itu, SPM-ITB dilengkapi dengan *Task Force* untuk tugas khusus yang bersifat *ad-hoc* dan dukungan administrasi dari Staf Sekretariat. Tugas dan fungsi utama SPM-ITB adalah mengembangkan dan menjabarkan sistem penjaminan mutu, serta melaksanakannya pada seluruh fakultas dan unit kerja yang ada.⁵

Di Universitas Pendidikan Indonesia, pola Satuan Penjaminan Mutu mendekati kesamaan dengan ITB hanya saja organisasi SPM-UPI sekedar bagian dari Unit Penunjang Kegiatan, bukan suatu organisasi mandiri dan berjenjang. Susunan kepengurusan SPM-UPI terdiri dari ketua, sekretaris, dan tim SPM. Berbeda dengan ITB, SPM-UPI hanya ada dalam administrasi Rektorat dan belum sampai tingkat Fakultas dan Program Studi.⁶

⁴ Ibid., hal.97-98

⁵ Ibid., hal. 98.

⁶ Ibid.

Tujuan Penjaminan Mutu Internal Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (1) PP . No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 96 (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri. (4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 96 ayat (2) PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Prosedur Penjaminan Mutu Internal Pendidikan

1. Tahap Pelaksanaan/Implementasi SPMI

Pembuatan dokumen atau buku SPMI yang berisi:

- a. **Kebijakan SPMI**, yang antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas.
- b. **Manual SPMI**, yang antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut;
- c. **Standar SPMI**, yang berisi antara lain minimum 8 (delapan) standar. Bagi pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP. No.19 tahun

1. ISI							
1.1 Kurikulum sudah sesuai dan relevan							
1.1.1 Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BSNP.							
Bukti-Bukti Fisik		Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ SK Tim Pengb. Kurikulum ✓ Notula Rapat Tim ✓ KTSP dokumen 1 ✓ Silabus, ✓ RPP ✓ LKS buatan Guru ✓ MoU dengan sekolah mitra ✓ MoU dengan sister school ✓ Media Pembelajaran 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sekolah kami memiliki Tim Pengembang Kurikulum ➤ Dalam penyusunan kurikulum sekolah kami melibatkan pengawas, dan komite sekolah ➤ Kerangka dasar kurikulum sudah sesuai dgn Panduan Penyusunan Kurikulum dari BNSP ➤ Struktur kurikulum sudah sesuai dgn Panduan Penyusunan Kurikulum dari BNSP ➤ Silabus tersedia untuk semua mata pelajaran ➤ Pembelajaran di kelas rendah menggunakan pendekatan tematik ➤ Dokumen kurikulum disahkan oleh Dinas Pendidikan sebelum diberlakukan ➤ Kurikulum sekolah kami disusun setiap 1 tahun sekali ➤ Kurikulum sekolah kami menjadi rujukan sekolah lain ➤ Kurikulum sekolah kami telah diimbaskan ke sekolah sekitar ➤ Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sekolah kami menjadi panduan sekolah lain dalam pengembangan kurikulum. ➤ Kurikulum sekolah kami telah mengadopsi dan mengadaptasi kurikulum Cambridge ➤ Kurikulum sekolah kami juga dikembangkan dengan kurikulum negara OECD, Korea Selatan 					
<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan Pengembangan 							
	Tahap ke-4		Tahap ke-3		Tahap ke-2		Tahap ke-1

Uraian Materi

PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Penjaminan mutu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan mutu. Pengelolaan mutu adalah suatu prosedur dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Tujuan utama dari sistem pengelolaan mutu adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam proses dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan sejak permulaan dipantau dan dikendalikan secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan mutu, sistem ini akan menjamin mutu out put.

Adapun sasaran yang dituju oleh pengelolaan mutu adalah meningkatkan mutu, produktivitas, dan efisiensi melalui perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas kerja. Dengan demikian, hakekat pengelolaan mutu adalah adalah suatu sistem pengelolaan secara terus menerus yang diarahkan untuk memberikan kepuasan pelanggan.

Dalam bidang pendidikan, pengelolaan mutu merupakan cara mengatur semua sumber daya pendidikan yang diarahkan agar semua orang yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

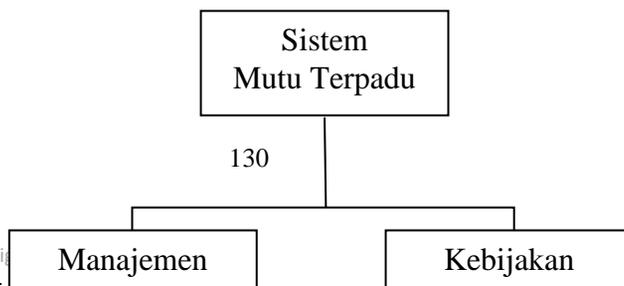
Sistem penjaminan mutu pendidikan ada dua, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Pertama, penjaminan mutu pendidikan internal dilakukan oleh lembaga pendidikan secara internal. Tujuan penjaminan mutu internal adalah memperbaiki kinerja dan khususnya memberikan akuntabilitas dan kepuasan kepada pelanggan atau stakeholder internal lembaga pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan terpadu perlu dijabarkan secara sistematis dan terencana.

Kedua, penjaminan mutu eksternal (*external quality assurance*) dari lembaga di luar yang independen, memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan kewenangan untuk melakukan akreditasi. Dengan demikian, penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penjaminan mutu melalui akreditasi.

Menurut sistem penjaminan mutu terpadu, penjaminan mutu internal dan eksternal harus terintegrasi dan terkait yang dipadukan dengan sistem perbaikan mutu berkelanjutan atau disebut siklus/daur ulang. Hubungan dua sistem dalam satu daur ulang perbaikan mutu berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.1. Hubungan sistem mutu terpadu dan sistem penjaminan mutu dalam satu daur perbaikan mutu berkelanjutan



Menurut Badan Akreditasi Sekolah nasional, akreditasi merupakan suatu proses yang memperlihatkan pengakuan masyarakat umum terhadap suatu institusi pendidikan yang memenuhi standar tertentu.² Menurut Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT), akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi.³ Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 Ayat 1, bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan pada Pasal 86 Ayat 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Dalam proses akreditasi, satuan pendidikan dievaluasi secara mendalam kaitannya dengan dasar filosofi dan tujuannya, serta bersarkan standar tertentu sebagai gambaran totalitas identitas satuan pendidikan sebagai institusi belajar. Semua satuan pendidikan dievaluasi berdasarkan standar pendidikan yang akan mendorong bagi perkembangan satuan pendidikan dan menjadi arahan untuk evaluasi berkelanjutan untuk mencapai tujuan prestasi yang tinggi.

Menurut Badan Akreditasi Sekolah Nasional, pengertian akreditasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi proses dan hasil. Sebagai sebuah proses, akreditasi merupakan bentuk pengamatan lapangan dengan menggunakan perangkat kriteria dan prosedur dalam rangka mendorong lembaga pendidikan mencapai standar kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagai hasil, akreditasi merupakan suatu bentuk sertifikasi atau status formal yang diakui oleh sebuah institusi atau badan akreditasi terhadap suatu institusi pendidikan yang telah memenuhi standar kualitas yang lebih

² Departemen Pendidikan Nasional, *Badan Akreditasi nasional (BASNAS)*. (Tanpa Penerbit, 2003), hal, 33.

³ BAN PT, *Buku 2: Standard an Prosedur Akreditasi Program Studi*. (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2010), hal. 2.

baik dari pada sekedar memenuhi kebutuhan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴ Menurut Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 5 tentang Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah, akreditasi sekolah atau madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akreditasi adalah sisten penilaian yang mendalam terhadap satuan pendidikan dengan menggunakan perangkat dan kriteria dalam rangka memenuhi standar pendidikan untuk menentukan mutu dan peringkat kelayakan institusi pendidikan.

Akreditasi dapat dikatakan sebagai janji institusi pendidikan untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Akreditasi memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa dalam basis pembiayaan pendidikan, institusi pendidikan akan melaksanakan berbagai program dengan sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas dan peralatan yang memadai, serta melaksanakan semua program yang dimiliki dengan sungguh-sungguh.

Akreditasi membuktikan kualitas satuan pendidikan dalam kaitannya dengan pemahaman setiap orang. Untuk mengatakan bahwa satuan pendidikan telah terakreditasi adalah dengan mengatakan bahwa satuan pendidikan tersebut telah memenuhi jaminan dan standar kualitas yang diakui oleh masyarakat. Akreditasi yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan bukanlah sekedar status belaka, melainkan bersifat dinamis. Oleh karena itu, akreditasi membutuhkan komitmen dan perhatian terus menerus. Dengan kata lain, akreditasi merupakan suatu proses yang tidak berhenti dengan satu tindakan untuk mencapai status akreditasi, tetapi proses yang menjamin bahwa satuan pendidikan berlanjut untuk mencari peningkatan mutu pendidikan.

Dengan akreditasi, satuan pendidikan akan memiliki percaya diri dan dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dengan demikian, akreditasi secara tidak langsung menyatakan perkembangan untuk menuju peningkatan kualitas melebihi standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

⁴ Depdiknas, *Badan Akreditasi....* hal., 33-34.

Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Adil

Dalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

Lembaga Pelaksana Akreditasi

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu peraturan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional sebagai criteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia.

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan atau mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dapat melakukan penjaminan mutu sekolah masing-masing.

Pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 86 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Untuk menjaga akuntabilitas publik, selain menetapkan aturan-aturan pelaksanaannya, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai mana dijelaskan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 2 bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau *lembaga mandiri yang*

No.	Mata Pelajaran	KKM (%)
1	Agama	65
2	Pendidikan Kewarganegaraan	65
3	Bahasa Indonesia	65
4	Bahasa Inggris	55
5	Matematika	50
6	IPA	50
7	IPS	58
8	Seni Budaya	70
9	Pendidikan Jasmani	60

Instrumen Akreditasi

16	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
<input type="checkbox"/>	A Sebanyak 4 atau lebih mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75
<input type="checkbox"/>	B Sebanyak 3 atau lebih mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75
<input type="checkbox"/>	C Sebanyak 2 atau lebih mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75
<input type="checkbox"/>	D Sebanyak 1 atau lebih mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75
<input type="checkbox"/>	E Tidak ada mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih

Petunjuk Teknis

Jawaban dibuktikan dengan dokumen rapat dewan guru yang membahas penetapan KKM tiap-tiap mata pelajaran dan hasil KKM yang ditetapkan.

Instrumen Pengumpulan data dan informasi

Tulislah Bukti Pendukung
1.
2.
3.
dst.

- MI Nurul Huda Bojonegoro memiliki siswa sebanyak 350 dengan rombongan belajar 12. MI ini memiliki luas tanah 450 M² dan gedung tingkat dua.

66	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa.
<input type="checkbox"/> A	Memiliki lahan seluas 76% — 100% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih
<input type="checkbox"/> B	Memiliki lahan seluas 51% — 75% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih
<input type="checkbox"/> C	Memiliki lahan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih
<input type="checkbox"/> D	Memiliki lahan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih
<input type="checkbox"/> E	Tidak tersedia lahan

Petunjuk Teknis

Tabel Rasio minimum luas lahan terhadap Siswa bagi SD yang memiliki siswa 15-28 siswa per rombongan belajar

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Luas Minimum Lantai (M2) Bangunan terhadap Siswa		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Tabel Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki 15-28 Siswa per Rombongan Belajar

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (M2)		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
1	6	1340	770	710
2	7-12	2240	1220	850
3	13-18	3170	1690	1160
4	19-24	4070	2190	1460

Apabila sekolah/madrasah menyewa, terdapat surat perjanjian sewa untuk hak menggunakan minimal selama 5 (lima) tahun.

Instrumen Pengumpulan data dan informasi

Luas lahan sekolah/madrasah:.....m ²
Bukti Pendukungnya

3.

70	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa dan lantai gedung.
<input type="checkbox"/> A	Memiliki lantai seluas 76% — 100% dari ketentuan luas minimal atau lebih
<input type="checkbox"/> B	Memiliki lantai seluas 51% — 75% dari ketentuan luas minimal atau lebih
<input type="checkbox"/> C	Memiliki lantai seluas 26% — 50% dari ketentuan luas minimal atau lebih
<input type="checkbox"/> D	Memiliki lantai seluas 1% — 25% dari ketentuan luas minimal atau lebih
<input type="checkbox"/> E	Tidak memiliki gedung sendiri

Petunjuk Teknis

Tabel Rasio Minimum Luas Lantai untuk SD/MI yang Memiliki 15-28 Siswa per Rombongan Belajar

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Luas Minimum Lantai (M2) Bangunan terhadap Siswa		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

Tabel Rasio Minimum Luas Lantai untuk SD/MI yang memiliki siswa kurang dari 15-28 siswa per rombongan

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lantai Bangunan		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
1	6	400	460	490
2	7-12	670	730	760
3	13-18	950	1010	1040

Instrumen Pengumpulan data dan informasi

Luas lantai sekolah/madrasah:.....m ²
Bukti Pendukungnya

4. Sebuah MI memiliki siswa sebanyak 380 siswa. Siswa dibebani membayar SPP sebesar Rp. 100.000 termasuk biaya UTS dan UAS. Namun, demikian 10 siswa yang kurang

mampu dan berprestasi dibebaskan dari biaya SPP. Sebanyak 75 siswa diberikan keringanan membayar SPP mulai dari Rp. 20.000 sampai Rp.50.000

Instrumen

127	Sekolah/Madrasah memungut biaya pendidikan
<input type="checkbox"/>	A Seluruh siswa tidak dipungut biaya pendidikan
<input type="checkbox"/>	B Sebanyak 1% — 25% siswa dipungut biaya pendidikan
<input type="checkbox"/>	C Sebanyak 26% — 50% siswa dipungut biaya pendidikan
<input type="checkbox"/>	D Sebanyak 51% — 75% siswa dipungut biaya pendidikan
<input type="checkbox"/>	E Sebanyak 76% — 100% siswa dipungut biaya pendidikan

Petunjuk Teknis

Jawaban dibuktikan dengan surat ketetapan Kepala Sekolah/Madrasah atau Yayasan yang menetapkan ada tidaknya iuran.

Instrumen Pengumpulan data dan informasi

Tulislah Bukti Pendukung
5.
6.
7.
dst.

5. Standar Pengelolaan SMP/MTs

104	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga, selaras dengan visi institusi di atasnya dan sesuai dengan perkembangan serta tantangan di masyarakat.
<input type="checkbox"/>	A Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami dan disosialisasikan
<input type="checkbox"/>	B Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
<input type="checkbox"/>	C Merumuskan dan menetapkan visi visi bersama warga sekolah/madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya mudah dipahami dan disosialisasikan
<input type="checkbox"/>	D Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya mudah dipahami tetapi

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	3	B		
11	3	C		
12	2	D		
13	2	C		
14	3	C		
15	3	A		
16	3	B		
17	2	A		
Jumlah	54			

2. Standar Proses

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	3	C		
19	3	B		
20	3	C		
21	3	C		
22	3	B		
23	3	B		
24	3	D		
25	3	D		
26	3	C		
27	2	D		
28	2	C		
29	3	C		
Jumlah	34			

3. Standar Kompetensi Lulusan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	3	B		
31	3	B		
32	3	B		

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	3	B		
34	3	B		
35	3	B		
36	3	B		
37	3	B		
38	3	A		
39	3	B		
40	3	B		
41	3	B		
42	3	A		
43	3	A		
44	3	A		
45	3	C		
46	3	A		
47	3	A		
48	3	A		
49	3	A		
Jumlah	60			

4. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	4	A		
51	3	A		
52	3	A		
53	4	A		
54	3	A		
55	3	A		
56	4	B		
57	3	B		
58	3	A		
59	3	B		
60	3	A		
61	3	B		

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62	3	C		
63	2	C		
64	2	C		
65	2	C		
66	2	C		
67	3	C		
68	2	B		
69	3	D		
70	3	B		
71	2	C		
72	3	D		
73	2	A		
74	2	C		
75	2	A		
Jumlah	72			

5. Standar Sarana dan Prasarana

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76	3	A		
77	3	A		
78	3	A		
79	3	A		
80	3	A		
81	3	A		
82	3	A		
83	3	A		
84	3	A		
85	2	B		
86	3	B		
87	3	B		
88	3	B		
89	3	B		
90	4	B		

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91	4	B		
92	3	B		
93	2	B		
94	3	B		
95	2	B		
96	3	B		
97	2	B		
98	2	B		
99	2	B		
100	3	B		
101	1	B		
102	2	B		
103	3	C		
Jumlah	77			

6. Standar Pengelolaan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
104	3	C		
105	3	C		
106	3	C		
107	3	C		
108	3	C		
109	3	C		
110	3	C		
111	3	B		
112	4	B		
113	3	C		
114	3	B		
115	3	C		
116	4	B		
117	3	C		
118	2	A		

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119	3	B		
120	3	A		
121	3	B		
122	3	A		
123	3	B		
Jumlah	61			

7. Standar Pembiayaan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	4	A		
125	3	B		
126	3	C		
127	3	B		
128	4	C		
129	3	B		
130	4	A		
131	3	C		
132	3	A		
133	3	D		
134	3	A		
135	2	C		
136	1	A		
137	3	C		
138	3	A		
139	2	C		
140	3	C		
141	3	A		
142	3	C		
143	2	A		
144	3	C		
145	4	B		

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
146	3	C		
147	3	B		
148	3	C		
Jumlah	74			

8. Standar Penilaian Pendidikan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
149	3	B		
150	3	A		
151	3	A		
152	3	A		
153	3	A		
154	3	A		
155	4	A		
156	3	A		
157	2	A		
158	2	A		
159	3	B		
160	2	B		
161	2	B		
162	3	B		
163	2	B		
164	3	B		
165	3	B		
166	3	B		
167	3	B		
168	4	B		
169	4	B		
Jumlah	61			

Uraian Materi

AKREDITASI UNTUK PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

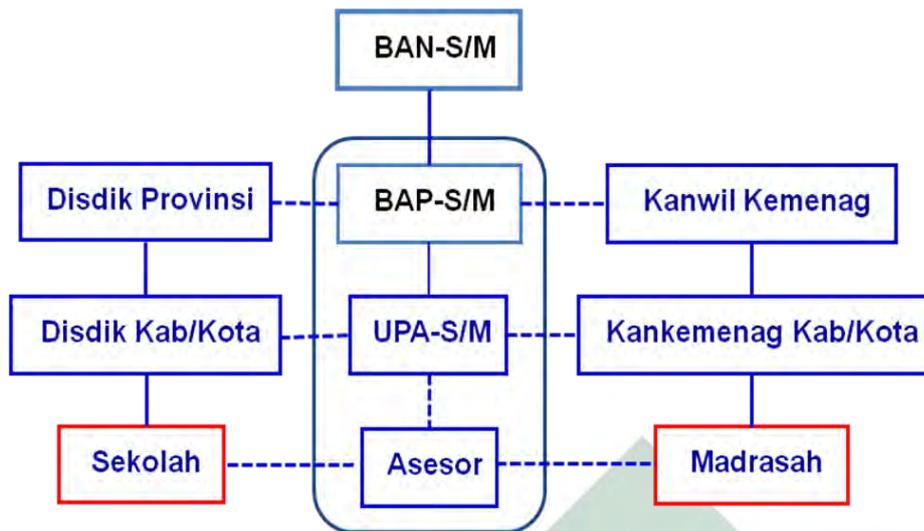
Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional merupakan salah satu agenda yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat yakni suatu jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan harapan mereka.

Apabila setiap lembaga penyelenggara pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas dan upaya ini dilakukan secara terus menerus, maka diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja satuan pendidikan atau program pendidikan. Akreditasi adalah sarana untuk melakukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki satuan pendidikan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Proses akreditasi harus sampai pada titik membuka dan memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya, di mana satuan pendidikan telah dan akan melaksanakan berbagai program kerja dengan sumber daya yang dimilikinya baik manusia maupun sumber daya lainnya secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan keluaran yang bermutu pula. Proses akreditasi harus didukung oleh pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat semua komponen yang ada pada satuan pendidikan dan penyelenggara. Pada pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana menyiapkan akreditasi sekolah/madrasah sebagai praktik dalam menyiapkan perangkat akreditasi.

Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah

Sejak 2013 diberlakukan 15 tahap untuk mempersiapkan akreditasi sekolah/madrasah. Lima belas tahap inilah yang harus dipahami dan dilakukan oleh seluruh komponen yang ada pada satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan penyelenggara akreditasi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terlibat dalam akreditasi, yaitu:



**Bagan Unsur-Unsur yang Terlibat dalam Pelaksanaan Akreditasi
Sumber dari BAN-S/M 2013**

Berikut ini adalah mekanisme akreditasi berdasarkan ketentuan dari BAN-S/M 2013.

1. Penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah

BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi sesuai dengan alokasi APBN/APBD untuk setiap jenis/jenjang di masing-masing kab/kota.

BAP-S/M berkoordinasi dengan Disdik Provinsi dan Kanwil Kemenag untuk menentukan satuan/program pendidikan yang akan diakreditasi sesuai prioritas dan persyaratan yang berlaku.

BAP-S/M menyampaikan alokasi sekolah/madrasah untuk setiap kab/kota kepada Disdik dan Kankemenag Kab/Kota.
2. Pengumuman secara terbuka kepada sekolah/madrasah

BAP-S/M mengumumkan secara terbuka kepada sekolah/ madrasah yang memenuhi syarat agar mendaftarkan diri untuk diakreditasi. Pengumuman disampaikan melalui surat ke Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kankemenag, media masa, website, dan media lainnya.

Sekolah mendaftar untuk diakreditasi melalui Disdik Provinsi/Kab/Kota, dan madrasah mendaftar melalui Kanwil Kemenag/Kankemenag.
3. Pengusulan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi

Disdik Provinsi/Kab/Kota mengusulkan kepada BAP-S/M daftar nama dan alamat sekolah yang telah memenuhi syarat untuk diakreditasi.

Kanwil Kemenag/Kankemenag mengusulkan kepada BAP-S/M daftar nama dan alamat madrasah yang telah memenuhi syarat untuk diakreditasi.

Sekolah/madrasah yang diusulkan untuk diakreditasi mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan pada langkah 1.
4. Penyampaian Perangkat Akreditasi ke sekolah/madrasah

BAP-S/M menyampaian Perangkat Akreditasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi. Sekolah/madrasah dapat memperoleh Perangkat Akreditasi melalui website BAN-S/M, BAP-S/M, UPA-S/M, dan sumber resmi lainnya.
6. Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung

Sekolah/madrasah menelaah perangkat akreditasi secara keseluruhan. Sekolah/madrasah mengisi (a) Instrumen Akreditasi, dan (b) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung, secara obyektif dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi.

6. Pengiriman Isian Instrumen Akreditasi

Sekolah/madrasah mengirimkan berkas akreditasi kepada BAP-S/M atau melalui UPA-S/M Kab/Kota, dengan tembusan ke Disdik dan Kankemenag Kab/Kota. Instrumen akreditasi yang sudah diisi lengkap, dikirim ke BAP-S/M dilengkapi dengan dokumen berikut:

- a. Surat pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang keabsahan data dalam instrumen akreditasi.
- b. Surat keputusan pendirian/operasional sekolah/madrasah.
- c. Daftar jumlah siswa pada semua tingkatan kelas pada tahun berjalan.
- d. Surat kepemilikan dan foto sarana dan prasarana yang dimiliki.
- e. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Keterangan pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- g. Daftar siswa yang lulus pada tahun terakhir.

7. Melakukan evaluasi isian instrumen dan audit dokumen

BAP-S/M bersama dengan sejumlah asesor melakukan evaluasi terhadap isian instrumen akreditasi dan mengaudit dokumen yang diserahkan oleh sekolah/madrasah. Audit dilakukan terhadap dokumen persyaratan mengikuti akreditasi yang diserahkan oleh sekolah/madrasah.

Evaluasi isian instrumen dilakukan dengan mengecek pemenuhan kriteria nilai minimal terakreditasi dan korelasi antar nilai komponen akreditasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan audit dokumen tersebut, disusun daftar sekolah/madrasah yang direkomendasikan untuk divisitasi.

8. Penetapan kelayakan sekolah/madrasah untuk divisitasi

BAP-S/M melakukan rapat pleno untuk menetapkan sekolah/madrasah yang layak divisitasi berdasarkan hasil evaluasi dan audit dokumen. BAP-S/M mempersiapkan kegiatan visitasi ke sekolah/madrasah yang layak divisitasi.

Bagi sekolah/madrasah yang tidak layak divisitasi, BAP-S/M membuat surat pemberitahuan yang menjelaskan agar sekolah/madrasah tersebut melakukan perbaikan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

9. Penugasan Tim Asesor

BAP-S/M menugaskan tim asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/ madrasah, dilengkapi dengan surat tugas, dokumen dan format-format yang diperlukan untuk melaksanakan visitasi. Tim asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah sesuai pedoman dan kode etik asesor yang berlaku. Tim asesor menyampaikan laporan visitasi kepada BAP-S/M, disertai dokumen:

- a. Berita acara pelaksanaan visitasi
- b. Laporan individu
- c. Laporan Tim Asesor
- d. Rekomendasi
- e. Foto sarpras, kegiatan sekolah/madrasah, dan kegiatan visitasi.
- f. Soft copy file data sesuai format pendataan

10. Validasi hasil visitasi.

Hasil visitasi yang dilaporkan oleh tim asesor perlu divalidasi untuk menjamin bahwa proses dan hasil akreditasi sudah sesuai ketentuan. Validasi proses akreditasi dilakukan terhadap (a) kesesuaian asesor dengan penugasan, (b) kesesuaian waktu pelaksanaan visitasi, (c) kesesuaian tahapan visitasi, (d) berita acara pelaksanaan visitasi yang ditandatangani kepala sekolah/madrasah dilengkapi dengan foto pelaksanaan akreditasi.

Validasi hasil akreditasi dilakukan terhadap (a) kelengkapan laporan hasil visitasi, (b) ketepatan menghitung nilai akhir akreditasi, (c) kesesuaian kondisi obyektif sekolah/madrasah secara umum dengan hasil visitasi, dan (d) kesesuaian nilai akhir akreditasi dengan rekomendasi. Validasi dilakukan oleh BAP-S/M bersama dengan UPA-S/M. Apabila ditemukan penyimpangan dalam proses dan hasil visitasi, BAP-S/M dapat menugaskan asesor berbeda untuk melakukan visitasi ulang.

11. Verifikasi dan penyusunan rekomendasi.

Sebelum menetapkan hasil akreditasi, BAP-S/M bersama anggota BAN-S/M melakukan verifikasi terhadap hasil validasi. Verifikasi bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran dokumen hasil validasi dan kesesuaian rekomendasi dengan data. Langkah yang dilakukan adalah:

- (a) mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi,
- (b) mengecek berita acara validasi, dan melakukan penilaian dan menyusun rekomendasi untuk setiap jenjang, jenis sekolah/madrasah dan kabupaten/kota.

12. Penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi

BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah melalui rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BAP-S/M dan sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-S/M.

Penetapan hasil akreditasi diputuskan melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil melalui suara terbanyak (*voting*). Hasil pleno penetapan akreditasi dituangkan dalam berita acara. Rapat pleno penetapan hasil akreditasi menetapkan:

- a. Hasil dan peringkat akreditasi (*hard and soft copy file*).
- b. Rekomendasi tindak lanjut.

Apabila hasil rapat pleno sudah dinyatakan final, BAP-S/M menerbitkan surat keputusan hasil dan peringkat akreditasi.

13. Penerbitan sertifikat akreditasi

BAP-S/M menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai dengan format dan blanko yang dikeluarkan oleh BAN-S/M. BAP-S/M menyampaikan sertifikat akreditasi kepada sekolah/madrasah disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.

14. Pelaporan data dan hasil akreditasi

BAP-S/M melaporkan data dan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M sesuai format pendataan. BAP-S/M menyampaikan hasil akreditasi kepada Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kankemenag, dan pihak-pihak lain yang terkait.

15. Sosialisasi hasil akreditasi

BAP-S/M mensosialisasikan hasil-hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui seminar, media masa, website, compact disk, dan forum-forum lainnya. Seminar hasil

akreditasi harus diselenggarakan BAP-S/M dengan mengundang BAN-S/M, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, Kanwil/Kankemenag, UPA-S/M, Perguruan Tinggi, DPRD, Pers, Lembaga Penyelenggara Pendidikan, Pakar Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan lain-lain.

Bagaimana Sekolah/Madrasah Menyiapkan Akreditasi

Kegiatan yang sangat penting bagi sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi adalah pengisian instrument akreditasi. Pada tahap ke empat dalam mekanisme akreditasi, BAP-S/M menyampaikan Perangkat Akreditasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi. Sekolah/madrasah dapat memperoleh Perangkat Akreditasi melalui website BAN-S/M, BAP-S/M, UPA-S/M, dan sumber resmi lainnya.

Tahap kelima adalah tahapan dalam mekanisme akreditasi yang harus dipenuhi oleh sekolah/madrasah, yaitu dengan menelaah perangkat akreditasi secara keseluruhan. Sekolah/madrasah mengisi instrument akreditasi. Dalam mengisi instrument akreditasi, sekolah/madrasah harus memperhatikan perangkat akreditasi yang terdiri dari:

1. Instrumen Akreditasi,
yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai kelayakan sekolah/ madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya akan diolah dalam penentuan peringkat akreditasi.
2. Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen
Penjelasan tentang pengisian instrumen akreditasi dan pembuktian jawaban atas instrumen tersebut, baik berupa dokumen, bukti fisik ataupun fakta yang harus diperlihatkan oleh pihak sekolah/madrasah kepada tim asesor pada saat visitasi
3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi
Daftar pertanyaan dalam bentuk isian yang menggambarkan profil sekolah/madrasah yang berfungsi sebagai *cross check* (pemeriksaan silang) terhadap jawaban sekolah/madrasah yang diberikan melalui instrumen akreditasi
4. Teknik Penskoran dan Pemingkatan Hasil Akreditasi
Petunjuk bagaimana mengolah skor hasil akreditasi dengan formula dan kriteria yang telah ditetapkan. Sekolah/madrasah melakukan penskoran terhadap isian instrument sehingga tahu posisi skor dan status akreditasi madrasah yang mengacu pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh madrasah. Hasil skor dikumpulkan bersamaan dengan intrumen dan instrument pengumpulan data dan informasi ke BAP-S/M. Pada tahap berikutnya akan dibahas tersendiri tata cara skoring akreditasi.

Instrumen Akreditasi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan Juknis Instrumen Akreditasi. Oleh sebab itu agar dapat menjawab butir-butir pernyataan instrumen, terlebih dahulu harus membaca dan memahami Juknis Pengisian Instrumen.

Setiap jawaban pada butir pernyataan instrumen harus dibuktikan dengan bukti fisik, dokumen, atau fakta seperti dijelaskan pada Juknis. Bukti verifikasi atas jawaban butir pernyataan instrumen dapat dilakukan *cross check* melalui Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi yang diisi oleh pihak sekolah/madrasah.

Jumlah butir instrument akreditasi sekolah tingkat dasar atau SD/MI terdiri dari 157 butir. Jumlah butir instrument akreditasi untuk SMP/MTs terdiri dari 169 butir. Jumlah butir untuk

69	Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan.
<input type="checkbox"/> A	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
<input type="checkbox"/> B	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
<input type="checkbox"/> C	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan di bawah pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
<input type="checkbox"/> D	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan di bawah pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
<input type="checkbox"/> E	Tidak memiliki tenaga perpustakaan

Contoh bobot butir 3 pada butir 75

75.	Sekolah/Madrasah memiliki petugas layanan khusus.
<input type="checkbox"/> A	Memiliki 4 jenis atau lebih petugas layanan khusus
<input type="checkbox"/> B	Memiliki 3 jenis petugas layanan khusus
<input type="checkbox"/> C	Memiliki 2 jenis petugas layanan khusus
<input type="checkbox"/> D	Memiliki 1 jenis petugas layanan khusus
<input type="checkbox"/> E	Tidak memiliki petugas layanan khusus

Berikut ini adalah bobot komponen akreditasi SMP/MTs

No.	Komponen Akreditasi	Bobot Komponen
1	Standar Isi	13
2	Standar Proses	15
3	Standar Kompetensi Lulusan	13
4	Standar Pendidik & Tendik	15

5	Standar Sarana & Prasarana	12
6	Standar Pengelolaan	11
7	Standar Pembiayaan	10
8	Standar Penilaian Pendidikan	11
Jumlah		100

Adapun langkah-langkah penskoran hasil akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Menghitung skor tertimbang perolehan untuk setiap komponen akreditasi, mulai dari standar isi sampai dengan standar penilaian pendidikan.

Berikut contoh penghitungan skor tertimbang perolehan tingkat SMP/MTs:

Standar Isi

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3	B	3	9
2	3	A	4	12
3	3	B	3	9
4	3	A	4	12
5	3	C	2	6
6	2	C	2	4
7	2	C	2	4
8	2	B	3	6
9	3	B	3	9
10	3	B	3	9
11	3	C	2	6
12	2	D	1	2
13	2	C	2	4
14	3	C	2	6
15	3	A	4	12
16	3	B	3	9
17	2	A	4	8
Jumlah	54	47		127

Standar Proses

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	3	C	3	9

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	3	A	4	12
20	3	C	2	6
21	3	B	3	9
22	3	B	3	9
23	3	B	3	9
24	3	D	1	3
25	3	D	1	3
26	3	C	2	6
27	2	C	2	4
28	2	C	2	4
29	3	C	2	6
Jumlah	34	28		80

Standar Kompetensi Lulusan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	3	B	3	9
31	3	B	3	9
32	3	B	3	9
33	3	B	3	9
34	3	B	3	9
35	3	B	3	9
36	3	B	3	9
37	3	B	3	9
38	3	A	4	12
39	3	A	4	12
40	3	A	4	12
41	3	A	4	12
42	3	A	4	12
43	3	A	4	12
44	3	A	4	12
45	3	A	4	12
46	3	A	4	12
47	3	A	4	12
48	3	A	4	12
49	3	A	4	12
Jumlah	60	72		216

Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	4	A	4	16
51	3	A	4	12
52	3	A	4	12
53	4	A	4	16
54	3	A	4	12
55	3	A	4	12
56	4	B	3	12
57	3	B	3	9
58	3	A	4	12
59	3	B	3	9
60	3	A	4	12
61	3	B	3	9
62	3	C	2	6
63	2	C	2	4
64	2	C	2	4
65	2	C	2	4
66	2	C	2	4
67	3	C	2	6
68	2	B	3	6
69	3	C	2	6
70	3	B	3	9
71	2	C	2	4
72	3	C	3	9
73	2	A	4	8
74	2	C	2	4
75	2	A	4	8
Jumlah	72	79		225

Standar Sarana dan Prasarana

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76	3	A	4	12
77	3	A	4	12
78	3	A	4	12
79	3	A	4	12
80	3	A	4	12
81	3	A	4	12

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
82	3	A	4	12
83	3	A	4	12
84	3	A	4	12
85	2	B	3	6
86	3	B	3	9
87	3	B	3	9
88	3	B	3	9
89	3	B	3	9
90	4	B	3	12
91	4	B	3	12
92	3	B	3	9
93	2	B	3	6
94	3	B	3	9
95	2	B	3	6
96	3	B	3	9
97	2	B	3	6
98	2	B	3	6
99	2	B	3	6
100	3	B	3	9
101	1	B	3	3
102	2	B	3	6
103	3	C	2	6
Jumlah	77	92		255

Standar Pengelolaan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
104	3	C	2	6
105	3	C	2	6
106	3	C	2	6
107	3	C	2	6
108	3	C	2	6
109	3	C	2	6
110	3	C	2	6
111	3	B	3	9
112	4	B	3	12
113	3	C	2	6
114	3	B	3	9

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	3	C	2	6
116	4	B	3	12
117	3	C	2	6
118	2	A	4	8
119	3	B	3	9
120	3	A	4	12
121	3	B	3	9
122	3	A	4	12
123	3	B	3	9
Jumlah	61	53		161

Standar Pembiayaan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	4	A	4	16
125	3	B	3	9
126	3	C	2	6
127	3	B	3	9
128	4	C	2	8
129	3	B	3	9
130	4	A	4	16
131	3	C	2	6
132	3	A	4	12
133	3	D	1	3
134	3	A	4	12
135	2	C	3	6
136	1	A	4	4
137	3	C	3	9
138	3	A	4	12
139	2	C	2	4
140	3	C	2	6
141	3	A	4	12
142	3	C	2	6
143	2	A	4	8
144	3	C	2	6
145	4	B	3	12
146	3	C	2	6
147	3	B	3	9

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
148	3	C	2	6
Jumlah	74	72		212

Standar Penilaian Pendidikan

No Butir	Bobot Butir	Skor Butir		Skor Tertimbang Perolehan
		Huruf	Angka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
149	3	B	3	9
150	3	A	4	12
151	3	A	4	12
152	3	A	4	12
153	3	A	4	12
154	3	A	4	12
155	4	A	4	16
156	3	A	4	12
157	2	A	4	8
158	2	A	4	8
159	3	B	3	9
160	2	B	3	6
161	2	B	3	6
162	3	B	3	9
163	2	B	3	6
164	3	B	3	9
165	3	B	3	9
166	3	B	3	9
167	3	B	3	9
168	4	B	3	12
169	4	B	3	12
Jumlah	61	72		209

2. Menentukan nilai komponen akreditasi untuk masing-masing standar.

No	Komponen	Bobot Komponen	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum	Jumlah Skor Tertimbang Perolehan	Nilai Komponen Akreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)={ (5):(4) }x(3)
1	Isi	13	180	127	91.7
2	Proses	15	136	80	8.82
3	Lulusan	13	240	216	11.7

4	Tendik	15	288	225	11.71
5	Sarpras	12	308	255	12.54
6	Pengelolaan	11	244	161	7.25
7	Pembiayaan	10	296	212	7.16
8	Penilaian	11	244	209	9.42

3. Menentukan nilai komponen akreditasi skala ratusan (0-100).

No	Komponen	Bobot Komponen	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum	Jumlah Skor Tertimbang Perolehan	Nilai Komponen Akreditasi	Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6)=\{(5):(4)\}x(3)$)	$(7)=\{(6):(3)\}x(100)$)
1	Isi	13	180	127	9.17	71
2	Proses	15	136	80	8.82	59
3	Lulusan	13	240	216	11.7	90
4	Tendik	15	288	225	11.71	78
5	Sarpras	12	308	255	9.93	83
6	Pengelolaan	11	244	161	7.25	66
7	Pembiayaan	10	296	212	7.16	72
8	Penilaian	11	244	209	9.42	86
Nilai Akhir Akreditasi					75.625	76
Nilai Akhir Akreditasi (Pembulatan)					76	

Status Akreditasi : Terakreditasi/Tidak Terakreditasi *)

Peringkat Akreditasi : A / **B** / C *)

4. Menentukan nilai akhir akreditasi sekolah/madrasah.
Sekolah/Madrasah dinyatakan Terakreditasi jika memenuhi seluruh kriteria berikut.
- Memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sekurang-kurangnya 56.
 - Tidak lebih dari dua Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan kurang dari 56.
 - Tidak ada Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan kurang dari 40.
 - Sekolah/Madrasah dinyatakan Tidak Terakreditasi (TT), jika tidak memenuhi kriteria di atas.
5. Penentuan Nilai Akhir Akreditasi harus dituliskan dalam bentuk bilangan bulat tanpa koma.
- Jika lebih dari 0,50 dibulatkan menjadi 1;
 - Jika sama dengan 0,50 dibulatkan menjadi 1; dan
 - Jika kurang dari 0,50 dibulatkan menjadi 0.

6. Menentukan peringkat akreditasi sekolah/madrasah.

Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut.

- a. Peringkat akreditasi A (Sangat Baik), jika memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 86 sampai dengan 100, atau $86 \leq NA \leq 100$.
- b. Peringkat akreditasi B (Baik), jika memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 85, atau $71 \leq NA \leq 85$.
- c. Peringkat akreditasi C (Cukup Baik), jika memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 56 sampai dengan 70, atau $56 \leq NA \leq 70$.

Rangkuman

Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat dikerucutkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja satuan pendidikan atau program pendidikan.
2. Pentingnya akreditasi adalah untuk melakukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki satuan pendidikan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Proses akreditasi harus sampai pada titik membuka dan memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya, di mana satuan pendidikan telah dan akan melaksanakan berbagai program kerja dengan sumber daya yang dimilikinya baik manusia maupun sumber daya lainnya secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan keluaran yang bermutu pula.
3. Pelaksanaan akreditasi meliputi 15 tahap yang harus dilalui.
4. Kegiatan yang sangat penting bagi sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi adalah pengisian instrument akreditasi. Pada tahap ke empat dalam mekanisme akreditasi, BAP-S/M menyampaikan Perangkat Akreditasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian akreditasi!
2. Jelaskan pentingnya akreditasi?
3. Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi?
4. Berapa tahapan yang hars dilalui dalam pelaksanaan akreditasi?
5. Tahap ke berapa sekolah/madrasah harus mengisi perangkat akreditasi untuk mempersiapkan akreditasi?
6. Sebutkan komponen dari perangkat akreditasi?
7. Dari mana sekolah/madrasah bisa mendapatkan perangkat akreditasi?
8. Kemana perangkat akreditasi yang telah diisi oleh sekolah atau madrasah diserahkan?
9. Siapakah yang melakukan klarifikasi, validasai, dan penilaian untuk akreditasi madrasah?

Paket 11

GUGUS KENDALI MUTU

Pendahuluan

Bagi banyak orang peningkatan kualitas identik dengan Gugus Kendali Mutu (*quality circle*). Gugus Kendali Mutu adalah fitur penting dari metode pengendalian mutu di Jepang. Mereka adalah tim khusus yang dibentuk untuk peningkatan kualitas.

Meskipun Manajemen Mutu berasal dari Amerika Serikat, di Jepang penggunaan Gugus Kendali Mutu lebih ekstensif. GKM dianggap sebagai bagian penting dari proses kualitas di Jepang, yang tidak dikembangkan di Barat. Filosofi TQC Jepang pada dasarnya adalah campuran dari ide Deming tentang pengendalian proses statistik dengan GKM. Setsuo Mito di bukunya *The Honda Book of Management* mengatakan bahwa: “TQC dan QC adalah kegiatan Gugus

Kendali Mutu yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan moral pekerja dan membawa perbaikan kualitatif dalam manajemen di mana pun mereka dipraktikkan di mana saja di dunia”

Ini mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan sukarela dan setelah - jam gambar yang tidak cocok dengan mudah ke dalam budaya industri Barat. Di Barat, tim dan kerja sama tim memiliki telah ditekankan di tempat lingkaran kualitas. Dalam paket ini perkuliahan tentang gugus Kendali Mutu menggunakan aktivitas diskusi dan Diskusi berpasangan untuk membantu mahasiswa menyerap materi perkuliahan lebih cepat.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami Gugus Kendali Mutu

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian Gugus Kendali Mutu

Uraian Materi

GUGUS KENDALI MUTU

Asal-Usul dan Pertumbuhan GKM

Upaya untuk meningkatkan mutu dan produktivitas serta kinerja suatu satuan kerja baik dunia usaha maupun pendidikan perlu dilaksanakan terus menerus sedemikian sehingga dapat berfungsi dan mencapai tujuannya secara optimal. Sejak dahulu, terutama di Eropa dan Amerika Serikat dikembangkan konsep manajemen dan organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi. Antara lain dapat dikemukakan adalah konsep Max Weber tentang Birokrasi, Konsep Taylor tentang Manajemen ilmiah, Fayol dengan 14 prinsip-prinsip, serta konsep perilaku manusia yang mengutamakan motivasi dan pendekatan demokrasi. Konsep serta prinsip organisasi dan manajemen ini, telah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi baik pada perusahaan, pemerintahan dan organisasi social.

Total Quality Control (Pengendalian Mutu Terpadu) yang diprakarsai oleh Dr. J.M. Juran dan Dr. E.W. deming dan dikembangkan di Jepang oleh Kaoru Ishitawa dengan menerapkan Quality Control Circle (QCC) atau gugus Kendali Mutu (GKM). GKM merupakan kelompok orang diorganisasi yang bertugas mengendalikan mutu. Peningkatan mutu sering terjadi karena adanya tim yang bekerja karena tugas tabahan, yang masing-masing dirancang untuk memecahkan masalah, memperbaiki proses yang ada atau merancang desain yang baru.

Bagi banyak orang peningkatan kualitas identik dengan Gugus Kendali Mutu (*quality circle*). Gugus Kendali Mutu adalah fitur penting dari metode pengendalian mutu di Jepang. Mereka adalah tim khusus yang dibentuk untuk peningkatan kualitas.

Di Jepang penggunaan Gugus Kendali Mutu lebih ekstensif dari pada di tempat lain, meskipun Manajemen Mutu berasal dari Amerika Serikat. Filosofi TQC Jepang pada dasarnya adalah campuran dari ide Deming tentang pengendalian proses statistik dengan GKM. Setsuo Mito di

bukunya *The Honda Book of Management* mengatakan bahwa: “TQC dan QC adalah kegiatan Gugus Kendali Mutu yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan moral pekerja dan membawa perbaikan kualitatif dalam manajemen di mana pun mereka dipraktikkan di mana saja di dunia”

GKM dianggap sebagai bagian penting dari proses kualitas di Jepang, yang tidak dikembangkan di Barat. Ini mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan sukarela dan setelah - jam gambar yang tidak cocok dengan mudah ke dalam budaya industri Barat. Di Barat, tim dan kerja sama tim memiliki telah ditekankan di tempat lingkaran kualitas. Sangat menarik bahwa dalam satu yang paling berpengaruh dari panduan praktis AS untuk TQM, *Tim Handbook*, oleh Peter R Scholtes dan kontributor (1988), tidak ada referensi untuk lingkaran kualitas. Sebaliknya, Kaoru Ishikawa, yang merupakan salah satu penulis Jepang terkemuka tentang penjaminan mutu, melihat GKM sebagai dasar proses peningkatan kualitas. Dalam karyanya *Total Quality Control*, Ishikawa (1985) memetakan pengembangan gerakan kualitas di Jepang berawal 1950-an melalui pertumbuhan gerakan Gugus Kendali Mutu. Dia menggambarkan GKM sebagai kelompok-kelompok kecil berdasarkan saling percaya, yang sukarela melakukan aktivitas pengendalian mutu di tempat kerja, dan yang menggunakan metode kendali mutu dan teknik Tujuan dari GKM. Ishikawa menyarankan, bahwa untuk berkontribusi pada peningkatan dan pengembangan perusahaan, Tim mutu ini biasanya terbatas karena jumlahnya agar lebih mudah untuk mencapai keberhasilan dengan tugas yang dikelola. Proyek-proyek kecil yang gagal tidak membahayakan kredibilitas seluruh proses. Idanya adalah bahwa serangkaian keberhasilan yang dimulai dari yang kecil akan berkembang hingga sesuatu yang jauh lebih besar. Tim mutu perlu memiliki fokus yang sama sehingga ada koherensi dan arah, dengan hasil akhir yang menguntungkan pelanggan tertentu, baik internal maupun eksternal. Awalnya, tim perlu belajar mencari pola, pendekatan, dan mencari solusi secara permanen dan tahan lama.

Oleh karena itu, tim tidak bisa dibentuk dengan sekejap. Mereka harus melalui formasi proses yang sangat penting untuk menfungsikan kemampuan mereka. Tim membutuhkan waktu untuk tumbuh dan matang, dan

umumnya diakui bahwa tim berkembang melalui siklus pertumbuhan. B W Tuckman, sebagaimana dikutip oleh Salis, telah menyarankan pertumbuhan empat tahap dan siklus kematangan pengembangan tim, yaitu:¹

1. Membentuk (*forming*). Pada tahap ini mereka masih belum menjadi tim, melainkan hanya kumpulan orang yang telah datang bersama-sama dengan tujuan tetapi memiliki sedikit gagasan bagaimana bekerja sama atau apa aturan dan norma-norma keterlibatan. Ada beberapa emosi yang terkait dengan tahap ini, mulai dari kegembiraan, optimisme, idealisme, kebanggaan dan antisipasi melalui takut, kecurigaan dan kecemasan. Diskusi utama akan memusatkan pada isu-isu filosofis yang terkait dengan konsep dan abstraksi, atau hambatan organisasi untuk sukses bekerja. Pada tahap membentuk tim dapat dengan mudah terganggu dan dapat mulai berurusan dengan hal-hal di luar kekuasaannya. Beberapa anggotanya mungkin lebih peduli dengan mempertanyakan otoritas mereka pada kelompok dari pada mengerjakan tugas. Pola-pola perilaku yang sering dianggap sebagai menyianyikan waktu dan usaha. Pada kenyataannya, mereka adalah normal dan perlu. mereka adalah proses penting bahwa tim mana pun harus melalui proses ini. mereka sesuai dengan kedelapan dan kesembilan dari pendapat Deming tentang 14 poin mutu: yaitu mengusir rasa takut sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif, dan memecah hambatan antara bagian. Tim kendali mutu tidak akan terbentuk kecuali mereka sudah mampu mencapai tahap kedua, yaitu *storming*.
2. Menyerbu (*storming*). Tahap ini adalah tahap yang sangat sulit. Ini adalah tahap ketika anggota menyadari skala tugas masa depan dan dapat menyikapi terhadap tantangan dengan baik. Setiap anggota tim saling memiliki kepentingan individu yang membutuhkan usaha untuk mempersatukan persepsi mereka. Antar anggota secara interpersonal mungkin timbul permusuhan. tahap ini membutuhkan waktu untuk menyatukan tim dalam menjalankan tugas sampai konflik pada tahap ini

¹ Edward Salis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogn Page, 2002), hal. 74-75.

ditangani dengan benar. Pemimpin tim harus mengenali sumber konflik apapun. Ini adalah periode ketika anggota mulai memahami satu sama lain. Humor dan kesabaran adalah kualitas penting bagi seorang pemimpin tim pada tahap *storming*, seperti keteguhan dan tekad dan mulai menciptakan kejelasan, tujuan, dan mengadopsi filosofi baru. Selanjutnya, tim akan memasuki tahap *norming*.

3. *Norming*, adalah tahap ketika tim memutuskan dan mengembangkan metode kerja sendiri. Ini adalah proses di mana sebuah tim menetapkan aturan atau norma sendiri, dan memilah peran setiap anggota. Jika aturan didefinisikan dengan baik dan dipahami, tim memiliki peluang bagus untuk berfungsi dengan baik. Pendekatan terstruktur pelatihan dalam kerja sama tim dapat membantu jauh pada tahap ini untuk memasuki tahap *performing*.
4. Melakukan (*performing*). Tahap ini adalah tahap di mana anggota tim yang mampu menghindari perbedaan dan sesuai cara yang telah disepakati. Tim telah membangun sebuah identitas dan memiliki proses yang mapan untuk pemecahan masalah dan meningkatkan proses. Sebuah tim sepenuhnya telah matang yang dapat bekerja sama dan menggunakan sinergi kelompok kerja yang merupakan imbalan nyata dari kerja sama tim. Tahapan ini sesuai dengan tahapan ke lima dari 14 poin mutu yang dikemukakan oleh Deming, meningkatkan terus-menerus dan selamanya sistem produksi dan pelayanan, dan kepemimpinan lembaga. Tidak ada skala waktu khas untuk sebuah tim untuk mengikuti proses ini. Bahkan anggota tim paling berpengalaman perlu pertemuan untuk membangun diri sebagai tim baru, tetapi jika bagi tim baru untuk kerja tim akan memakan waktu lebih lama.

Pengertian Gugus Kendali Mutu

GKM adalah salah satu konsep baru untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja industri/jasa. Terbukti bahwa salah satu factor keberhasilan industrialisasi di Jepang adalah penerapan GKM secara efektif. Karena keberhasilan ini, sejumlah negara industri maju dan sedang berkembang

termasuk Indonesia, menerapkan GKM diperusahaan-perusahaan industri guna meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing.

GKM adalah sekelompok kecil karyawan yang terdiri dar 3 – 8 orang dari unit kerja yang sama, yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu di tempat kerjanya dengan menggunakan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. Tujuan GKM ini adalah untuk mendayagunakan seluruh asset yang dimiliki organisasiterutama sumber daya manusianya secara lebih baik, guna meningkatkan mutu dalam arti luas. Objek perbaikan GKM sangat luas meliputi bahan, proses, produk, lingkungan dan lain-lain. Peningkatan mutu dapat berasal dari anggota gugus, fasilitator, ketua GKM atau pimpinan organisasi. Penerapan GKM secara konsisten pada organisasi akan sangat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Perbaikan mutu dan peningkatan nilai tambah
2. Peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya
3. Peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target
4. Peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku
5. Peningkatan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan
6. Peningkatan ketrampilan dan keselamatan kerja
7. Peningkatan kepuasan kerja
8. Pengembangan tim (gugus kendali mutu)

Perangkat GKM

Perangkat-perangkat GKM adalah Fasilitator, Ketua GKM, Anggota dan Pimpinan Organisasi. Setiap perangkat tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut

1. Fasilitator

Fasilitator adalah seorang pembimbing dalam memecahkan persoalan/masalah yang dihadapi dan sekaligus merubah sikap mental pegawai khususnya anggota GKM, agar para pegawai menyadari sepenuhnya bahwa seluruh pegawai wajib menjaga dan meningkatkan

Paket 12

BENCHMARKING

Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, teknik yang pada umumnya dipakai adalah *benchmarking*. *Benchmarking* adalah upaya menjembatani di mana posisi sekarang dan tujuan yang akan dicapai. Sama seperti dalam dunia industry *benchmarking* juga digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan melakukan perbandingan antara suatu lembaga dengan lembaga lain, lembaga dapat mempelajari pengalaman terbaik dalam meraih kesuksesan suatu organisasi.

Lembaga pendidikan perlu mengembangkan perangkat untuk mengkaji baik kesuksesan dan kegagalan organisasi maupun *best practice* organisasi lain untuk membantu organisasi menghadapi kompetisi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. *Benchmarking* antar lembaga sering kali dengan mengunjungi sekolah-sekolah lain untuk mengetahui kinerja sekolah. Studi banding dalam pendidikan dipandang sebagai upaya penting untuk membandingkan apa yang dilakukan suatu sekolah dan belajar dari pengalaman menarik sebuah sekolah. Studi banding internasional dalam pendidikan dapat dilakukan antar Negara, hal ini dilakukan jika menghendaki lembaga pendidikan berkelas dunia.

Essensi dari *benchmarking* adalah membandingkan kinerja dari suatu proses kerja untuk mengidentifikasi bagaimana mereka mencapai sukses. *Benchmarking* adalah alat mengembangkan keuntungan kompetitif.

Untuk memahami *benchmarking* dalam pendidikan, mahasiswa akan melakukan diskusi dalam mengembangkan penalaran dan analisis kritis untuk menguasai tujuan perkuliahan. Agar menarik perhatian mahasiswa dan meningkatkan daya serap mahasiswa perkuliahan ini akan menggunakan kuis teka-teki silang.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami *benchmarking* untuk meningkatkan mutu pendidikan

1. laporan resmi yang bisa memberikan informasi *benchmarking*
2. asal atau asli atau berlaku secara umum
3. terbaik (Bahasa Inggris)
4. Fase dalam merancang *benchmarking*
5. kunjungan untuk *benchmarking*
6. Perbandingan (Bahasa Inggris)
7.Banding

Uraian Materi

BENCHMARKING

Benchmarking adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara ‘di mana kita sekarang’ dan ‘ke mana kita menuju’. Edward Sallis

Semua organisasi, baik negeri maupun swasta, dihadapkan pada peningkatan kompetisi dan organisasi yang memberikan layanan umum yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menunjukkan peningkatan akuntabilitas. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, terdapat teknik baru yang dapat membantu organisasi menghadapi kompetisi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan perangkat untuk mengkaji baik kesuksesan dan kegagalan organisasi maupun *best practice* organisasi lain.

Apa itu *benchmarking*?

Dalam dunia industry, *benchmarking* melibatkan analisis terhadap produk-produk terbaik serta layanan-layanan yang mempengaruhi pemasaran atau *best practice* lintas perusahaan. Produk-produk dan berbagai layanan inilah yang menjadi target atau *benchmarking*. Dalam pendidikan, *benchmarking* mengarahkan fokus pada apa yang dianggap sebagai *best practice* dan ciri-ciri organisasi meritokrasi. *Benchmarking* adalah standar untuk mengukur kinerja saat ini, yang biasanya untuk mencari kompetisi yang lebih baik dan upaya memahami cara meningkatkan mutu. Dalam perusahaan manufaktur, *benchmarking* merupakan perangkat yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan produk-produk baru dengan melibatkan evaluasi pada produk-

produk baru yang akhirnya menjadi sistem untuk menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing.

Essensi dari benchmarking adalah membandingkan kinerja dari suatu proses kerja untuk mengidentifikasi bagaimana mereka mencapai sukses. *Benchmarking* adalah alat mengembangkan keuntungan kompetitif. *Benchmarking* adalah upaya menemukan siapa yang terbaik dan bagaimana menjadi lebih baik dari yang terbaik. *Benchmarking* merupakan alat untuk belajar dan melakukan yang lebih baik dari pada penguasa pasar. pentingnya *benchmarking* adalah untuk meyakinkan bahwa standar mutu adalah standar yang bagus jika bukan yang terbaiki antara kompetitor.

Dalam pendidikan, terdapat berbagai alat sederhana untuk *benchmarking* yang dapat dijadikan media latihan bagi pengembangan staff. Guru dapat mengunjungi lembaga-lembaga lain dan melihat bagaimana segala sesuatunya dilaksanakan. Guru-guru dapat mengkaji *best practice* dan *lesson learned* yang dapat diterapkan di lembaga mereka. Kegunaan *benchmarking* adalah menemukan kembali pengalaman terbaik untuk membantu memecahkan masalah. Sejarah *benchmarking* bermula pada akhir tahun 1970-an dan seperti berbagai teknologi mutu lainnya, *benchmarking* asal-usulnya dari perusahaan Xerox.

Benchmarking dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sistematis untuk mengukur dan membandingkan kinerja suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Tujuan *benchmarking* adalah belajar dari pengalaman terbaik organisasi lain untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik dan belajar rahasia kesuksesan mereka. *Benchmarking* dapat mengarahkan organisasi pada level kelas dunia di mana model-model perusahaan atau *benchmarking* standar mereka di level dunia. Hal ini dapat diterapkan pada dunia pendidikan meskipun sering kali dunia pendidikan tidak mengukur mutu dalam term global. Kemungkinan terbuka dengan teknologi informasi mempermudah mendapatkan informasi lembaga lain yang memiliki pengalaman bagus dan menemukan cara kerja sama untuk belajar pada mereka. *Benchmarking* adalah alat penentu mutu yang berguna dan penting tidak hanya untuk peningkatan mutu berkesinambungan tetapi juga memberikan

perbandingan yang diperlukan untuk tujuan akuntabilitas. Oleh karena itu, *benchmarking* dapat memandang i organisasi sebagai model untuk peningkatan mutu. *Benchmarking* adalah alat bukti untuk peningkatan mutu dan pendamping yang dapat diperhitungkan dalam proses peningkatan mutu. Namun demikian, *benchmarking* bukan *copy paste* atau memata-matai sekolah lain. *Benchmarking* adalah belajar dari pengalaman terbaik; mengidentifikasi kesenjangan kinerja; dan memecahkan kesenjangan antara kualitas saat ini dengan harapan.

Benchmarking Internal

Benchmarking bukan membandingkan satu sekolah atau universitas satu dengan lainnya. *Benchmarking* internal adalah membandingkan dan belajar dari kinerja antar departemen yang dapat dijadikan sebagai latihan efektif dan biasanya menjadi titik awal yang baik. Beberapa organisasi belajar secara sistematis tentang praktik-praktik dan proses dari bagian lain organisasi. Latihan observasi sistematis, forum berbagi informasi, atau komunitas berbagi pengetahuan, adalah media belajar dari lainnya. *Benchmarking* internal adalah untuk menjawab masalah atau alat meraih tujuan yang tampaknya tidak realistic dari organisasi.

Benchmarking Fungsional

Membandingkan kinerja lembaga dengan sekolah, universitas, atau perguruan tinggi sebagai pesaing dapat menjadi media efektif. Hal ini bisa disebut dengan *benchmarking* fungsional karena membandingkan lembaga pendidikan dan memberikan ide yang sangat bagus untuk kinerja lembaga secara keseluruhan. Negara-negara Barat, seperti Negara Persemakmuran melakukan publikasi hasil belajar sekolah dan perbandingan detail indicator kinerja antar universitas. Hal ini sangat bermanfaat karena masalah dari berbagai lembaga dapat diperbandingkan dan memperjelas aspek-aspek kinerja yang diperbandingkan.

Benchmarking fungsional ada dua macam, yaitu untuk kepentingan kompetitif atau kolaborasi. *Benchmarking* untuk kompetitif untuk memahami bagaimana kinerja pesaing. Sering kali, kunci informasi sulit didapatkan atau bahkan sulit didapatkan

Kunjungan Pendidikan

Benchmarking antar lembaga sering kali dengan mengunjungi sekolah-sekolah lain untuk mengetahui kinerja sekolah. Studi banding dalam pendidikan dipandang sebagai upaya penting untuk membandingkan apa yang dilakukan suatu sekolah dan belajar dari pengalaman menarik sebuah sekolah. Studi banding internasional dalam pendidikan dapat dilakukan antar Negara, hal ini dilakukan jika menghendaki lembaga pendidikan berkelas dunia. Sumber informasi yang baik adalah berbentuk konferensi dan seminar, namun demikian kebanyakan data yang bagus untuk *benchmarking* dapat diperoleh melalui sumber-sumber resmi, laporan tahunan, laporan inspeksi, dan dari jurnal pendidikan.

Benchmarking Generik

Studi banding ke lembaga pendidikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Area yang dipandang penting dalam *benchmarking* adalah bidang manajemen, kerja tim, teknologi informasi, manajemen SDM, proses penjaminan mutu, dan pelayanan kepada pelanggan. Studi banding ini memberikan keuntungan untuk *benchmarking* kompetitif.

Bagaimana Menyusun *Benchmarking*?

Terdapat sejumlah pertanyaan fundamental yang harus dikemukakan pada saat melakukan *benchmarking*, yaitu:

1. Sebaik apa yang kita harapkan?
2. Apa standar yang digunakan untuk *benchmarking*?
3. Bagaimana kita mendapatkan yang terbaik dalam studi banding?
4. Apakah kita akan mengetahui siapa yang melakukan pengalaman terbaik?
5. Bagaimana kita membandingkan pengalaman yang terbaik?
6. Apa yang mereka lakukan sehingga menjadi terbaik?
7. Di mana kesenjangan dalam kinerja kita?
8. Bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman mereka?
9. Pengalaman yang bagaimana yang dapat menjembatani kesenjangan kita?

10. Bagaimana kita dapat melakukan yang lebih baik dari yang terbaik?
11. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi yang terbaik?

Merancang *Benchmarking*

Tahap 1 *Planning*

Sangat penting untuk merencanakan *benchmarking* dengan hati-hati. *Benchmarking* membutuhkan waktu dan biaya, sehingga perlu direncanakan dengan baik. *Benchmarking* yang sukses harus menentukan prioritas lembaga dan factor kritik untuk sebuah kesuksesan sebuah lembaga. Di samping itu, diperlukan juga pemahaman yang jelas tentang tujuan dan dan manfaat yang diharapkan dari *benchmarking*

Tahap 2, Mengidentifikasi Mitra Potensial

Tahap ini membutuhkan penelitian yang cermat terhadap mitra *benchmarking*. Hal ini adalah tahap mempertimbangkan apa jenis *benchmarking*, apakah internal, fungsional, atau generic *benchmarking*? Apakah tujuannya sudah jelas?

Tahap 3, Analisis Proses dan Praktik dari Mitra *Benchmarking*

Mengidentifikasi pengalaman terbaik adalah kunci pada tahap ini, namun demikian tidak cukup hanya ini. Sama pentingnya dengan mengidentifikasi *best practices* memahami faktor pendorong mitra *benchmarking* meraih kesuksesan. Bagaimana mitra *benchmarking* melakukannya dan bagaimana memelihara kesuksesan.

Tahap 4, Mengadaptasikan pengalaman sendiri menjadi yang terbaik

Benchmarking tidak akan berdampak positif pada lembaga jika tidak mengadaptasikan pengalaman sendiri dengan informasi yang diperoleh. Tahap ini adalah tahap yang sulit karena melibatkan upaya-upaya manajemen dalam merubah budaya dan menerapkan praktik-praktik kerja yang baru.

Tahap 5, mereview keberhasilan sebuah aktivitas

Seperti halnya upaya manajemen, menelaah keberhasilan dan efektivitas aktivitas *benchmarking* dipandang sangat penting. Seperangkat pertanyaan dapat membantu mereview keberhasilan suatu aktivitas, yaitu,

- a. Apa tujuan yang diharapkan?

- b. Aktivitas apa yang dipandang berharga?
- c. Apakah semua person memiliki performa yang sama dengan mitra *benchmarking*?

Manfaat *Benchmarking*

1. *Benchmarking* menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang posisi lembaga saat ini
2. *Benchmarking* dapat meyakinkan lembaga memiliki serangkaian tujuan yang akan dicapai
3. *Benchmarking* menjadi alat untuk menemukan cara bagaimana organisasi lain melakukan suatu *best practices*
4. *benchmarking* mendorong budaya inovasi
5. *Benchmarking* meyakinkan bahwa terdapat usaha-usaha untuk menjadi yang terbaik.
6. *benchmarking* mengembangkan rencana tindakan yang realistis
7. *Benchmarking* dapat digunakan merumuskan mutu seperti pada keunggulan dalam Dunia Usaha.

Kritik terhadap *Benchmarking*

Meskipun *benchmarking* adalah teknik peningkatan mutu yang sangat populer, tidak lepas dari kekurang. terdapat orang-orang yang meyakini bahwa *benchmarking* dapat menyia-nyiakan usaha. Satu hal yang menjadi kritik keras adalah bahwa kesuksesan merupakan masalah budaya dan sangat sulit melakukan replikasi aspek-aspek kultur dari sebuah organisasi. Perbedaan kinerja sering disebabkan oleh kompetensi dan kapabilitas staff. Kompetensi dan kapabilitas staff yang penting, tetapi bersifat intangible, adalah komitmen, kreativitas, dan kemampuan menghadapi tantangan.

Rangkuman

Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat dikerucutkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan perangkat untuk mengkaji baik kesuksesan dan kegagalan organisasi maupun *best practice* organisasi

- lain untuk membantu organisasi menghadapi kompetisi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik menghasilkan nilai tambah secara ekonomi.
2. Essensi dari benchmarking adalah membandingkan kinerja dari suatu proses kerja untuk mengidentifikasi bagaimana mereka mencapai sukses. *Benchmarking* adalah alat mengembangkan keuntungan kompetitif.
 3. Macam-macam *benchmarking* adalah *benchmarking* internal, fungsional, dan generic.
 4. *Benchmarking* antar lembaga sering kali dengan mengunjungi sekolah-sekolah lain untuk mengetahui kinerja sekolah. Studi banding dalam pendidikan dipandang sebagai upaya penting untuk membandingkan apa yang dilakukan suatu sekolah dan belajar dari pengalaman menarik sebuah sekolah. Studi banding internasional dalam pendidikan dapat dilakukan antar Negara, hal ini dilakukan jika menghendaki lembaga pendidikan berkelas dunia.
 5. Meskipun *benchmarking* adalah teknik peningkatan mutu yang sangat populer, tidak lepas dari kekurang. terdapat orang-orang yang meyakini bahwa *benchmarking* dapat menyia-nyiakan usaha. Satu hal yang menjadi kritik keras adalah bahwa kesuksesan merupakan masalah budaya dan sangat sulit melakukan replikasi aspek-aspek kultur dari sebuah organisasi.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian *benchmarking*
2. Sebutkan manfaat *benchmarking*
3. Mengapa *benchmarking* dipandang penting sebagai teknik peningkatan mutu?
4. Apa yang dimaksud *benchmarking* fungsional
5. Bandingkan perbedaan antara *benchmarking* internal dan eksternal
6. Apa yang maksud *benchmarking* fungsional
7. Apa yang dimaksud dengan *benchmarking* generic?
8. Sebutkan tahapan merancang *benchmarking*?
9. Mengapa *benchmarking* mendapatkan kritik?
10. Sebutkan kritik terhadap *benchmarking*?